Jamkrida Jateng

LAPORAN TAHUNAN

2017

PT Jamkrida Jateng

PT Jamkrida Jateng Telah
Terdaftar dan Diawasi oleh

OJK
OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Jamkrida Jateng

PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah

2017 LAPORAN TAHUNAN

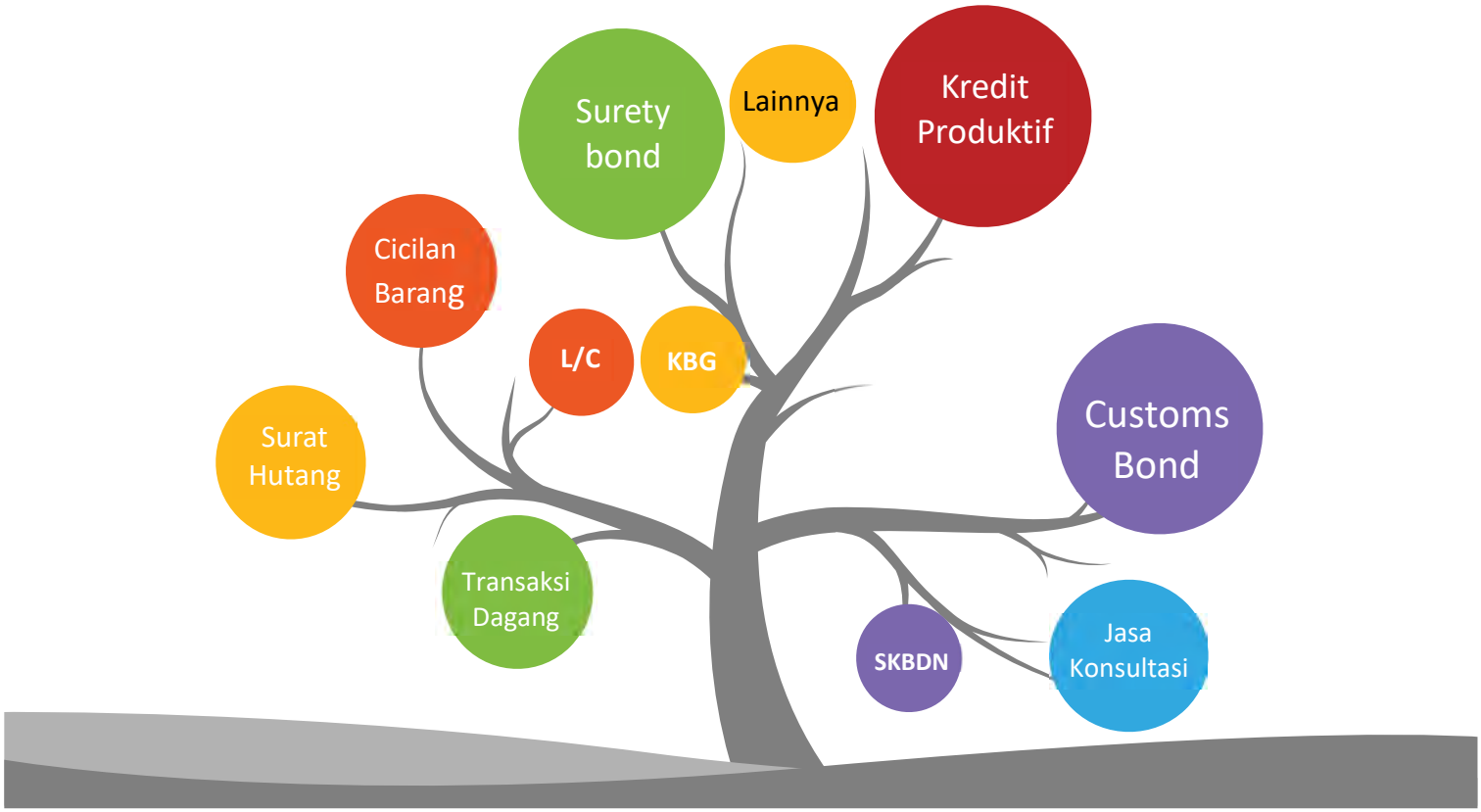

MEMPERKOKOH LANDASAN, MENINGKATKAN INOVASI & KREATIFITAS

www.jamkrida-jateng.co.id

“PT Jamkrida Jateng didirikan tidak semata-mata menjanjikan laba, tapi MAMPU menjadi pemicu *(trigger)* bagi UMKM dan menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat”

BETTER
LEBIH BAIK KE PENJAMINAN

INKLUSI KEUANGAN
untuk semua

PT Jamkrida Jateng telah terdaftar & di awasi oleh

OJK | OTORITAS JASA KEUANGAN

DAFTAR ISI

03 Ikthisar Keuangan

06 Pesan dari Dewan Komisaris & Direksi

10 Profil Perusahaan

13 Model Bisnis

15 Diversifikasi Kegiatan Usaha

18 Dewan Komisaris, Direksi & Kepala Divisi

21 Laporan Pelaksanaan Praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik

41 Kilas balik perusahaan

42 Penghargaan & Pengakuan

43 Aktivitas Tanggung Jawab Sosial

44 Laporan Keuangan

76 Informasi Kontak

77 Jaringan Kantor Pelayanan

Ikthisar Keuangan

Kinerja kami yang baik mencerminkan keberhasilan kami dalam menaikkan jumlah penjaminan kredit produktif , memberikan kepuasan kepada pelanggan dan fokus pada profitabilitas dan peningkatan asset.

- Pertumbuhan yang kuat pada kegiatan usaha perusahaan secara keseluruhan , Imbal Jasa Penjaminan *Cash Basis* sebesar Rp 43,2 Milyar naik sebesar 49% dibanding tahun 2016 hal ini didorong oleh berlanjutnya momentum Penjaminan Kredit
- Laba operasi sebesar Rp 6.471.387.620 (2016: Rp 1.343.690.674) Peningkatan laba secara signifikan diperoleh dari kegiatan usaha, penyertaaan modal dan diversifikasi penempatan Investasi. Laba perusahaan setelah Pajak sebesar Rp 5.588.863.481 (2016 : Rp 2.945.760.570)
- Laporan BOPO (Biaya Operasional terhadap pendapatan Operasional) sejalan dengan ekspansi perusahaan dengan ratio sebesar 109% (2016 : 116%), terdapat penurunan BOPO sebesar 7%
- Pembagian Laba perusahaan kepada Pemegang Saham naik sebesar 89% (2016: Rp 1,620,168,314)
- Tingkat kesehatan keuangan perusahaan secara keseluruhan adalah "Sangat Sehat"

Laba sebelum Pajak

Rp 7,44 M

(2016 : Rp 3,92 M)

ROA

4,3%

(2016 : 4,5%)

Rasio Klaim terhadap IJP

24%

(2016 : 11%)

Total Asset

Rp 172,9 M

(2016 : 88,1 M)

Gearing Ratio

14,6 Kali

(2016 : 13,1 Kali)

Laba Operasi

Rp 6,47 M

(2016 : 1,34)

Rasio Likuiditas

602%

(2016 : 723%)

Pendapatan Asli Daerah

Rp 3,07 M

(2016 : 1,62 M)

Penjaminan Produktif

27,8%

(2016 : 23,6%)

Investasi

Menciptakan Nilai tambah kepada Pemegang Saham

3 (tiga) tahun setelah perusahaan menjalankan kegiatan operasional, secara konsisten perusahaan telah memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah dengan total akumulasi dari tahun 2015 sampai dengan 2017 sebesar Rp 5,266 Milyar. Kesuksesan strategi kami didasarkan kepada *Balance scorecard Tools* yang memampukan kami untuk mencapai target jangka menengah perusahaan (2015-2019)

Total IJP Ditangguhkan

Rp 30,4 M

ROA

> 4%

Pertumbuhan Laba selaras dengan pertumbuhan Bisnis

Mempertahankan Rasio Likuiditas diantara 120% sd 800%

4 Sasaran strategik membantu perusahaan menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan

Sasaran Perspektif Financial

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Mensejahterakan karyawan
3. *Value creation* yang dapat memberikan nilai tambah kepada *stakeholder*
4. Peran serta dalam *Corporate Social Responsibility*

Sasaran Perspektif Bisnis Proses

1. Jamkrida Jateng akan menjadi *market leader* dalam bidang penjaminan.
2. Optimalisasi Rantai distribusi Jamkrida Jateng tercapai melalui penggunaan teknologi
3. Pengembangan teknologi Informasi yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan *brand corporate image*

Sasaran Perspektif Customer

1. Jamkrida Jateng akan mengakses semua wilayah potensial di Indonesia melalui jaringan mitra distribusi.
2. Dipercaya dalam Pelayanan dan pembayaran klaim berdasarkan norma-norma dalam Industri Penjaminan.
3. Menargetkan kenaikan pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) terbesar kedua di Industri Penjaminan

Sasaran Perspektif Pembelajaran & Pertumbuhan

1. Jamkrida Jateng didukung oleh team manajemen risiko dan kinerja manajemen yang baik, akan menjadi tempat dimana sumberdaya yang profesional dan inovasi dapat berkembang.
2. Jamkrida Jateng akan lebih besar dari saat 5 (lima) tahun didirikan, hal ini didasarkan pada program yang berkelanjutan, pertumbuhan yang positif , Melampaui kinerja yang telah ditetapkan

Rekam Jejak

Kinerja kami dalam 3 (tiga) tahun sejak Kegiatan Operasional dimulai, menggambarkan kekuatan kami dalam strategi dan proses

Nilai Penjaminan (Rupiah)

1,87 T

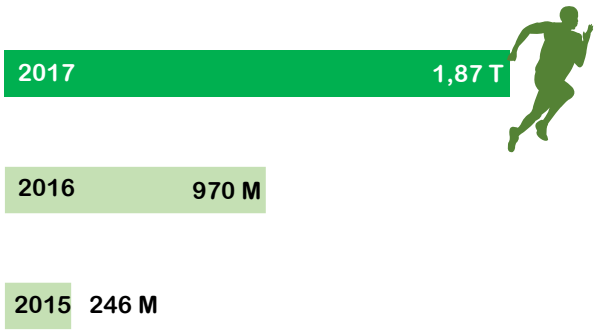

Jumlah Terjamin Produktif (Ribuan)

42,8 Ribu

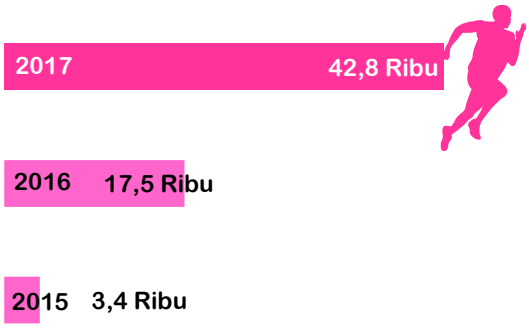

IJP Cash Basis (Milyar)

43,2 M

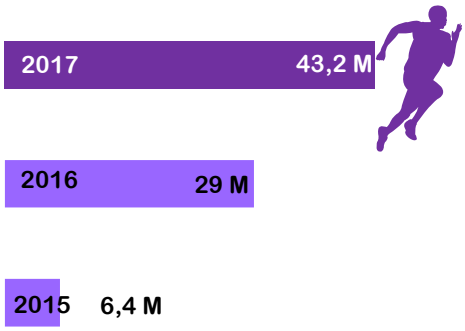

Net Profit Margin (%)

37%

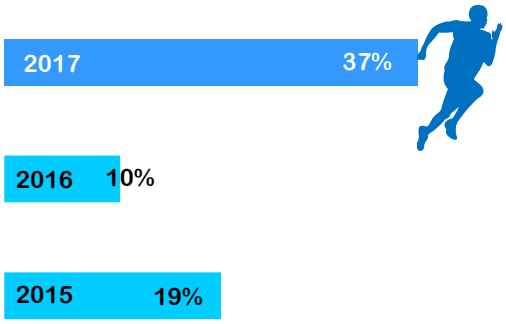

Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)

3,07 Milyar

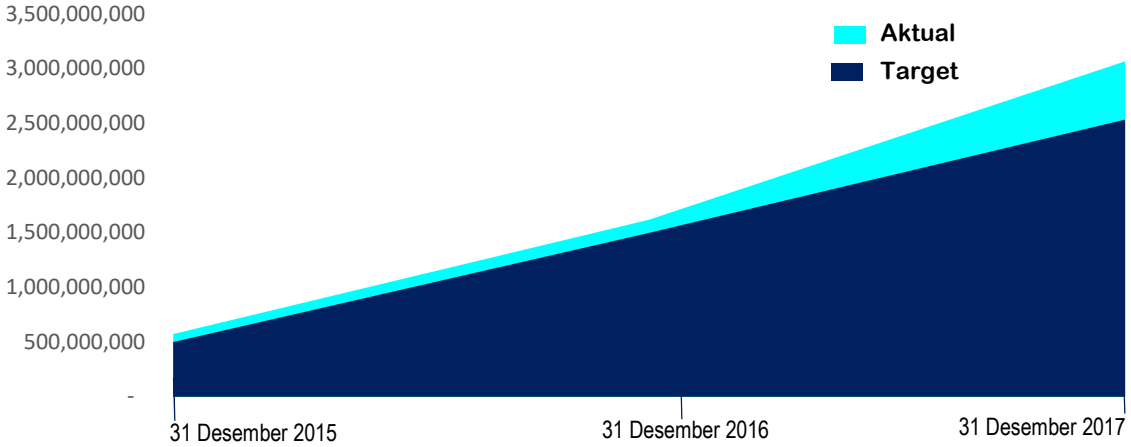

Meningkatkan pertumbuhan yang berkelanjutan

> Keberpihakan kepada UMKM dan tingkat imbal hasil kepada pemegang saham kami tetap menjadi fokus utama dalam lingkungan pasar yang menantang

Para Pemegang Saham yang Terhormat,

Kami mengucap syukur atas rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kami dapat menutup tahun 2017 ini dengan berbagai pencapaian yang luar biasa.

Di usia yang masih muda untuk sebuah Perusahaan Penjaminan , Perusahaan telah menunjukkan prestasi yang sangat baik dalam berbagai aspek. Karena itu, melalui kesempatan ini saya mewakili Dewan Komisaris dengan bangga memberikan laporan kepada pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan Perusahaan selama tahun 2017

Penilaian Atas Kinerja Direksi Tahun 2017

Dewan Komisaris menilai bahwa di tahun 2017, Direksi telah menjalankan fungsi dan perannya dengan optimal sehingga berhasil membawa Perusahaan mencapai target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan tersebut antara lain ditunjukkan dengan pertumbuhan Imbal Jasa Penjaminan sebesar 49%, dari Rp 29 miliar di tahun 2016 menjadi Rp 43,2 miliar di tahun 2017. Dengan pertumbuhan Imbal Jasa Penjaminan yang signifikan tersebut, Perusahaan berhasil mencatatkan laba sebesar Rp 5,58 miliar atau naik 89.7% dibandingkan Rp 2,94 Milyar tahun 2016. Pencapaian laba di usia Perusahaan yang baru tiga tahun beroperasi ini sungguh merupakan prestasi yang luar biasa bagi sebuah perusahaan dalam industri Penjaminan di Indonesia. Pencapaian tersebut mencerminkan sinergi positif antara Perusahaan dengan para mitra bisnisnya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah

Pandangan atas Prospek Usaha

Kemauan lembaga keuangan untuk menyalurkan kredit kepada UMKM yang *feasible* namun belum *Bankable* belum optimal , hal ini merupakan tantangan sekaligus kesempatan bagi Perusahaan untuk secara aktif mensosialisasikan pentingnya perusahaan Penjaminan untuk membantu UMKM mengakses permodalan kepada lembaga keuangan bank/non bank dan Koperasi , disamping itu Perusahaan secara aktif mencari & menemukan UMKM untuk dijaminkan ke Lembaga Keuangan yang telah bekerjasama.

Dalam menanggapi hal tersebut, Dewan Komisaris senantiasa mendorong Direksi agar mempersiapkan berbagai langkah strategis yang tepat guna mengantisipasi kondisi dan peluang di tahun 2018. Di antaranya adalah dengan terus meningkatkan sinergi dengan Bank Jateng, PD BPR BKK Se Jawa Tengah dan PD BKK Sejawa Tengah. Selain itu, perluasan jaringan bisnis dengan menjalin kerja sama dengan mitra bisnis lainnya

Pelaksanaan Tugas Pengawasan Tahun 2017

Sepanjang tahun 2017, Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan Perusahaan serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam hal penerapan tata kelola perusahaan, pengendalian internal serta kinerja Perusahaan.

Fokus utama dalam langkah Direksi selama periode 2017 adalah dengan mengembangkan perusahaan, baik dari segi bisnis, investasi, sumber daya manusia, maupun pelayanan. Langkah-langkah tersebut antara lain dengan menjalin dan meningkatkan kerjasama dengan mitra kerja utama.

Pada sisi sumber daya manusia, kami telah melihat upaya Direksi dalam pemenuhan sumber daya manusia, khususnya pada departemen-departemen terkait yang memberikan pelayanan kepada nasabah. Hal ini terkait erat dengan salah satu prioritas kita pada tahun ini yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah

Apresiasi

Atas nama Dewan Komisaris, kami menyampaikan Apresiasi kepada Direksi dan seluruh karyawan atas kinerja pencapaian luar biasa yang diraih oleh Perusahaan di tahun 2017. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh Pemegang Saham terutama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan komitmen dalam mendukung Permodalan kepada Perusahaan , Regulator, Mitra bisnis, nasabah dan masyarakat luas atas dukungan dan kepercayaan terhadap Perusahaan. Mari kita membangun masa depan UMKM (Usaha Mikro Kecil & Menengah) yang lebih baik dengan sinergi , Fokus kepada Solusi, Kerja Cerdas dan Antusias dalam melayani untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan bagi kesejahteraan bersama.

Semarang, Juni 2018

Atas nama Dewan Komisaris

Sujarwanto Dwiatmoko

Komisaris Utama

Highlight Tata Kelola

Tugas & Tanggung Jawab	Rangkap Jabatan	Pelatihan	Frekuensi Rapat	Remunerasi
Halaman 23	Halaman 24	Halaman 25	Halaman 26	Halaman 30

Memberikan Pelayanan yang Fleksibel & nilai tambah yang lebih baik kepada pelanggan

> Kemajuan tahun ini mencerminkan kerja cerdas yang telah dilakukan oleh karyawan kami dan fokus pada pelayanan pelanggan yang berkelanjutan

Kepada Pemegang Saham dan Seluruh Pemangku Kepentingan Yang Terhormat,

Atas Rahmat Allah SWT , PT Jamkrida Jateng berhasil melalui tahun ketiga beroperasi dengan pencapaian yang luar biasa . Sejak berdiri hingga saat ini, kami senantiasa berupaya untuk membangun landasan yang kuat untuk mencapai Visi 2039

Kinerja 2017

Di tahun 2017, upaya yang dilakukan Perusahaan telah membuahkan hasil yang membanggakan. Dari sisi keuangan, Perusahaan berhasil membukukan pendapatan Imbal Jasa Penjaminan sebesar Rp 43,2 miliar, atau tumbuh 49% dari Rp 29 miliar di tahun 2016.

Dalam hal pendapatan investasi, Perusahaan berhasil mencapai Rp 8,95 miliar atau naik 256% dari Rp 3,5 miliar di tahun 2016. Pertumbuhan signifikan dari berbagai segi, membuat Perusahaan mampu mencatatkan laba sebesar Rp 5,58 miliar atau naik 89.7% dibandingkan Rp 2,94 Milyar di tahun 2016.

Sedangkan dari sisi aset, Perusahaan berhasil tumbuh 196% menjadi Rp 172,98 Milyar di tahun 2017 dibandingkan Rp 88,1 miliar di tahun 2016. Jumlah Nasabah Produktif tahun 2017 sebanyak 42,821 Nasabah naik 144% dari jumlah Nasabah Produktif sebanyak 17,562 Nasabah di tahun 2016. Nilai Penjaminan Produktif tahun 2017 sebesar Rp 521,66 Milyar atau naik 228% dari Nilai Penjaminan Produktif Rp 228,76 Milyar di tahun 2016.

Pencapaian tersebut merupakan hasil dari perbaikan di berbagai bidang di Perusahaan, antara lain dari segi jaringan distribusi, kegiatan usaha dan layanan, infrastruktur maupun sumber daya manusia. Dalam hal jaringan distribusi, Perusahaan terus meningkatkan sinergi dengan Lembaga Keuangan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah , terutama dengan Bank Jateng , PD BPR BKK Sejawa Tengah dan PD BKK Sejawa Tengah, serta memperluas jaringan dengan menjalin kerja sama dengan mitra bisnis lainnya seperti lembaga keuangan Bank/Non Bank, Perusahaan Pembiayaan dan Koperasi

Hal ini merupakan kebanggaan tersendiri, mengingat baru tiga tahun Perusahaan beroperasi.

Dari sisi kegiatan usaha, Perusahaan telah mengembangkan kegiatan usaha yang fokus pada Penjaminan Kredit Produktif dan *Suretyship*.

Karyawan

Dari sisi sumber daya manusia, Perusahaan aktif melakukan perekrutan dengan menambah karyawan.

Infrastruktur IT

Perusahaan juga terus mengembangkan aplikasi digital untuk mendukung kegiatan bisnis perusahaan dan meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka memberikan pengalaman yang berbeda bagi nasabah.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Sebagai sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha penjaminan , maka Perusahaan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kesetaraan dan kewajaran dalam setiap aspek bisnis dan seluruh jajaran Perusahaan.

Untuk memantau penerapan Tata Kelola Perusahaaan tersebut, setiap tahun Perusahaan melakukan penilaian sendiri *(self-assessment)* dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perusahaan juga menerapkan pengendalian internal secara menyeluruh dan terintegrasi melalui pengembangan sistem dan prosedur yang aplikatif untuk mencegah terjadinya *fraud*.

Dalam mengelola risiko yang semakin berkembang dalam Penjaminan , Perusahaan mengacu pada kebijakan Manajemen Risiko Lembaga Keuangan

Strategi

Perusahaan tetap optimis bahwa bisnis Penjaminan memiliki prospek yang sangat cerah. Untuk mengantisipasi kondisi bisnis di tahun 2018, Perusahaan akan terus meningkatkan penetrasi pasar pada kegiatan usaha Penjaminan Kredit dan *Suretyship*

Prioritas utama kami pada tahun 2018 adalah melanjutkan upaya-upaya kami untuk menempatkan perusahaan pada posisi yang tepat untuk menghadapi pertumbuhan di masa depan, termasuk menyediakan pengalaman nasabah yang tak tertandingi dan memperluas rekam jejak kami di berbagai wilayah. Kami yakin bahwa dengan kekuatan jalur distribusi kami yang beragam, besarnya talenta yang kami miliki di dalam perusahan .

Apresiasi

Akhir kata, perkenankan kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan, baik para Pemegang Saham, segenap karyawan, mitra bisnis dan seluruh nasabah atas dukungan yang diberikan sehingga Perusahaan dapat melaksanakan seluruh program kerja di tahun 2017.

Semoga kerja sama dan sinergi yang telah kita capai akan terus berkesinambungan dan mampu menciptakan masa depan yang lebih baik bagi kita semua.

Semarang, Juni 2018

Atas nama Direksi

M Nazir Siregar

Direktur Utama

PT Jamkrida Jateng adalah Perusahaan Penjaminan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2014. Perusahaan resmi berdiri pada tanggal 06 Desember 2014 dengan nama Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah disingkat PT Jamkrida Jateng yang ditandatangani oleh Bapak Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah selaku Pemegang Saham Pengendali PT Jamkrida Jateng di hadapan Notaris Prof DR Liliana Tedjosaputro, SH, MH, MM dengan Akta Nomor 38 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-38355.40.10.2014 tanggal 08 Desember 2014.

PT Jamkrida Jateng memperoleh Izin Usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pada tanggal 03 Februari 2015 dengan Salinan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP – 7 / D.05 / 2015

Di tahun 2017 Jamkrida Jateng telah mencapai kinerja yang positif dengan Pendapatan IJP Bruto (*Cash Basis*) keseluruhan dari bisnis Penjaminan sebesar Rp 43,2 Milyar lebih dan total Mitra lembaga keuangan dan koperasi sebanyak 100 Mitra

PT Jamkrida Jateng menawarkan beragam layanan keuangan termasuk penjaminan kredit, *surety bond, custom bond,* kontra bank garansi dan konsultasi manajemen untuk pelaku UMKM dan Usaha Produktif di Jawa Tengah.

Melalui Sumber Daya yang handal dan profesional , Jamkrida Jateng telah melayani dan menjamin lebih dari 157.000 Terjamin di Jawa Tengah

Komposisi Pemegang Saham

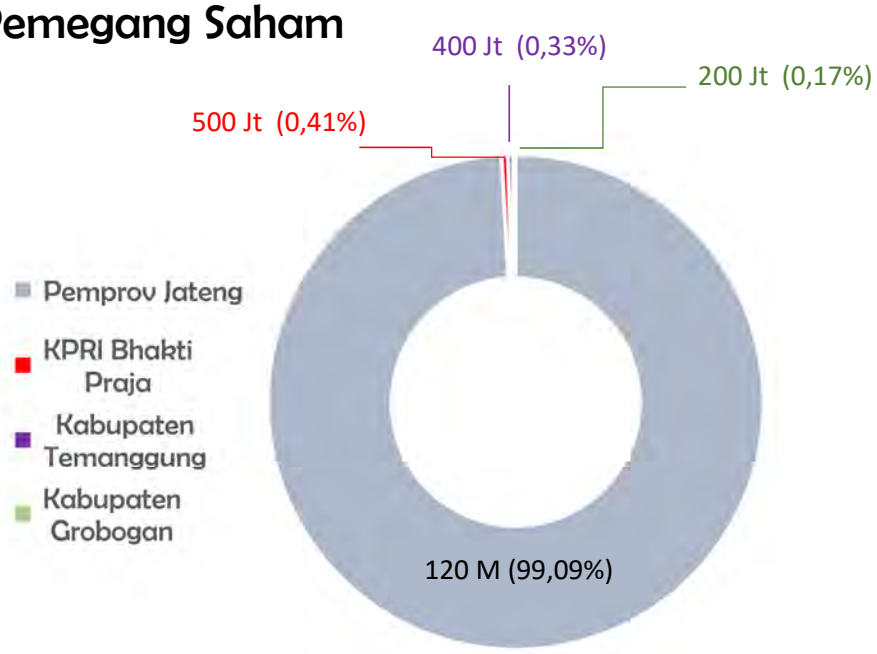

VISI & MISI

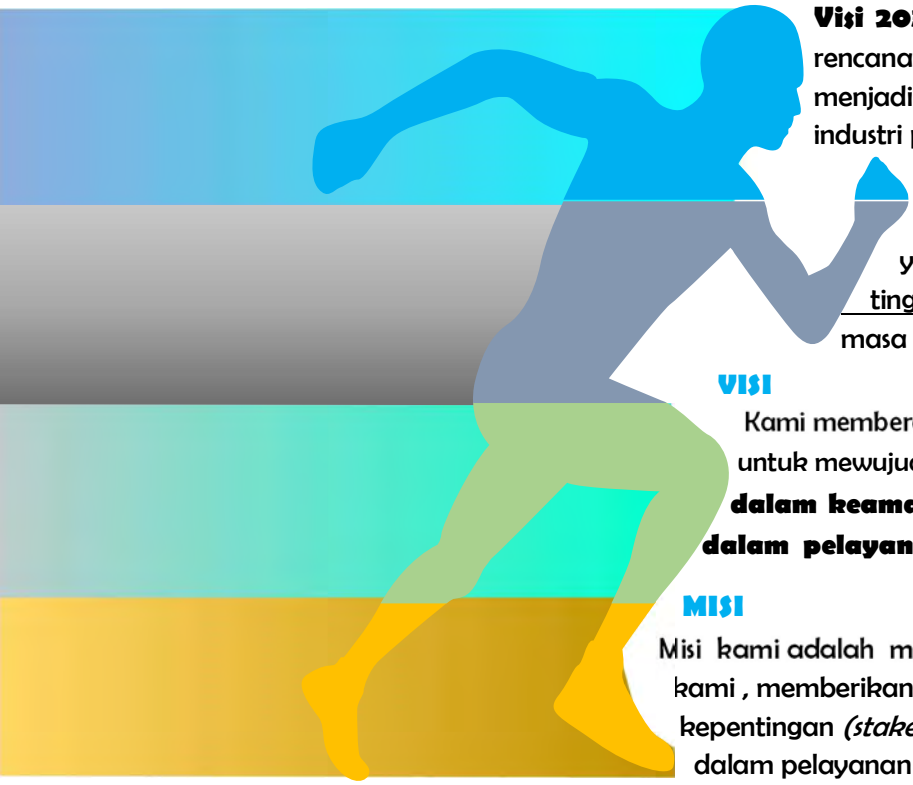

Visi 2039 bersifat Dinamis, Visi Jamkrida Jateng dan rencana yang akan diwujudkan akan berkembang menjadi perusahaan yang membuat perubahan di industri penjaminan ,

Jamkrida Jateng percaya bahwa kemajuan yang berkelanjutan didorong oleh orang-orang yang mempunyai imajinasi dan antusiasme yang tinggi untuk memperbaiki masa depan kita dan masa depan dari orang di sekitar kita .

VISI

Kami memberdayakan karyawan, mitra dan nasabah untuk mewujudkan **visi "menjadi yang Terbaik dalam keamanan penjaminan kredit , terdepan dalam pelayanan penjaminan kredit di Indonesia"**

MISI

Misi kami adalah menjadi mitra solusi bagi nasabah kami , memberikan nilai tambah kepada pemangku kepentingan *(stake holder)* melalui praktik terbaik dalam pelayanan & penjaminan kredit yang optimal.

Nilai-nilai Perusahaan

I SAFE

Untuk mencapai Visi Misi dan Strategi Perusahaan PT Jamkrida Jateng menetapkan 5 (lima) nilai-nilai perusahaan sebagai landasan dalam beraktivitas

Integritas

Kami melaksanakan kewajiban dengan baik dan benar, menjunjung tinggi nilai-nilai dan etika dalam berbisnis, setiap saat mematuhi kode etik dan *good corporate governancce*

Sinergi

Kami percaya bahwa sukses akan tercapai dengan melakukan sinergi semua pihak termasuk lembaga keuangan, koperasi, karyawan, pemegang saham dan pihak lainnya

Antusias

Energi, Semangat, Menciptakan ide-ide kreatif, keberanian dan Menghargai perbedaan

Fokus Pada Solusi

Pelanggan kami adalah fokus bisnis kami. Kami menyelaraskan semua tujuan bisnis dengan harapan pelanggan. Kami membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui kinerja yang unggul, responsip, menatap kedepan dan berkomitmen dalam semua transaksi dengan pelanggan

Efisien & Efektif

Kami mencari cara yang efektif & efisien untuk memecahkan masalah. Terus menerus mengukur diri untuk mendapatkan hasil yang tebaik, membuat kebijakan yang dinamis dan prosedur yang relevan. Mendukung secara konsisten sumber daya yang berkualitas

Strategi Perusahaan
Sasaran Jangka Panjang 25 Tahun

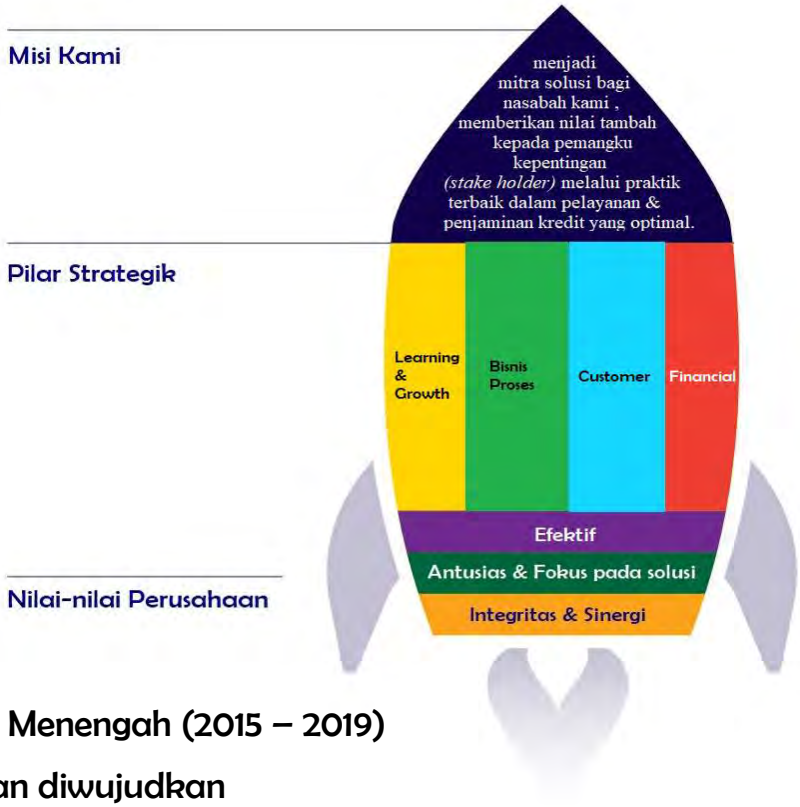

Sasaran Jangka Menengah (2015 – 2019)

Sukses yang akan diwujudkan

Perspektif Pembelajaran & Pertumbuhan

- ✓ Hasil output sumber daya harus positif dengan *benchmark* perusahaan yang sejenis Jamkrida Jateng, Penyempurnaan system dan inovasi ditingkatkan.
- ✓ Pembenahan di sisi HULU yaitu analisis beban kerja, analisis tenaga kerja termasuk jumlah tenaga kerja , komposisi tenaga kerja , dan kualitas tenaga kerja.
- ✓ Pengembangan pelatihan dan pendidikan.
- ✓ Standarisasi gaji, tunjangan dan kesejahteraan karyawan lainnya

Perspektif Bisnis Proses

- ✓ Fokus Pelayanan Optimal kepada nasabah
- ✓ Pengembangan Infrastruktur termasuk pengembangan *Web based*, data dan informasi berbasis digital dengan penggunaan *"user friendly"*
- ✓ Klaim: reputasi penanganan klaim yang cepat, tepat dan adil
- ✓ Efisien & Efektif dalam melakukan proses dan tindakan
- ✓ Diversifikasi Produk Penjaminan
- ✓ Mitigasi risiko

Perspektif Customer

- ✓ Pertumbuhan Imbal Jasa Penjaminan secara akumulasi Rp 75 Milyar (Moderat), Rp 95 Milyar (Optimis)
- ✓ Meningkatkan *Market Share* Jaminan Kredit dari Pendapatan IJP Nasional
- ✓ Mengembangkan jaringan Distribusi & Promosi
- ✓ Hasil Underwriting Positif : Penyebaran risiko yang Optimal diikuti dengan cadangan klaim yang baik
- ✓ Target Portfolio Produksi 80% Jaminan Kredit 20% Non Jaminan Kredit
- ✓ *Benchmarking & Rating* Pefindo

Perspektif Financial

- ✓ Meningkatkan modal & asset sebesar Rp 200 Milyar untuk dapat melakukan ekpansi ke seluruh wilayah Indonesia
- ✓ Diversifikasi Investasi dengan tingkat pengembalian positif
- ✓ Hasil Underwriting Positif : Penyebaran risiko yang Optimal diikuti dengan cadangan klaim yang baik
- ✓ Aktif dalamm melakukan *Corporate Social Responsibity*
- ✓ Perusahaan dengan kategori sehat (kategori A)

Menciptakan Nilai Tambah bagi *Stakeholder*

Kegiatan usaha kami dan multi saluran distribusi menawarkan berbagai pelayanan kepada pelanggan yang berbeda. Kami percaya pendekatan ini akan memungkinkan kami untuk memberikan nilai yang lebih baik bagi pelanggan dan imbal balik yang berkelanjutan bagi para pemegang saham

Kekuatan Kami

Fokus pada Customer

Kami menempatkan pelanggan sebagai prioritas utama, Kegiatan usaha dan saluran distribusi bertujuan untuk mempermudah akses penjaminan dan memberikan nilai tambah . Layanan klaim yang cepat, akurat dan efisien, memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan

Karyawan Berbakat

Kami berinvestasi kepada karyawan yang berbakat, mendorong semua karyawan agar bekerja secara optimal, inovosi dan kreatifitas ditingkatkan sehingga kami secara terus menerus dapat memberikan layanan yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan saat ini dan dimasa yang akan datang

Data & Teknologi

Kami memanfaatkan teknologi untuk mempermudah pelanggan dan karyawan. Kami bertujuan menggunakan teknologi yang fokus kepada pelanggan.

Modal & Kekuatan Keuangan

Kami memiliki model bisnis yang sederhana, namun *powerful* dalam menghasilkan pendapatan, penjaminan risiko yang selektif, pengelolaan klaim, pengendalian biaya , memenuhi kebutuhan pelanggan dan menargetkan imbal hasil yang berkelanjutan bagi pemegang saham

Layanan Kami

01 Penjaminan Kredit

02 Surety bond

03 Customs Bond

04 Kontra Bank Garansi

Tingkat Pengembalian

Kami berusaha memastikan bisnis kami dilakukan dengan baik dan terkendali. Kami mengelola keuangan dengan hati-hati dan menargetkan imbal hasil yang berkelanjutan bagi para pemegang saham

IJP Bersih

−

Klaim Bersih

−

Biaya

+

Investasi & Pendapatan lainnya

=

Profit

Nilai yang berkelanjutan

Karyawan

Karyawan merupakan asset perusahaan, kami berinisiatif mengembangkan, menciptakan nilai budaya berkinerja tinggi berdasarkan keragaman, pelatihan dan fokus kepada nasabah

Proses Bisnis

Kami secara terus menerus memperbaiki proses yang ada agar tercipta kinerja yang efektif dan efisien

Customer

Kami menawarkan penjaminan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dan layanam optimal serta memelihara hubungan emosional dengan mitra

Financial

Kami bertujuan memberikan nilai tambah kepada pemegang saham dengan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan dan meningkatkan penjaminan bagi UMKM/Usaha produktif

Diversifikasi Kegiatan Usaha

Kami memiliki kegiatan usaha dan saluran distribusi yang handal. Hal Ini memungkinkan nasabah kami memilih penjaminan yang tepat untuk melindungi usaha produktif/UMKM , gagal bayar akibat meninggal dunia atau PHK, kegiatan penjaminan proyek & Investasi dan kegiatan ekspor impor

- 01 Penjaminan Kredit
- 02 Suretybond
- 03 Kontra Bank Garansi
- 04 Customs Bond
- 05 Penjaminan atas surat utang
- 06 Letter of Credit (L/C)
- 07 SKBDN
- 08 Transaksi Dagang
- 09 Pembelian barang secara angsuran
- 10 Penjaminan atas surat utang
- 11 Jasa Konsultasi Managemen
- 12 Kegiatan usaha lainnya

Kinerja Lini Bisnis

Kegiatan Usaha Utama

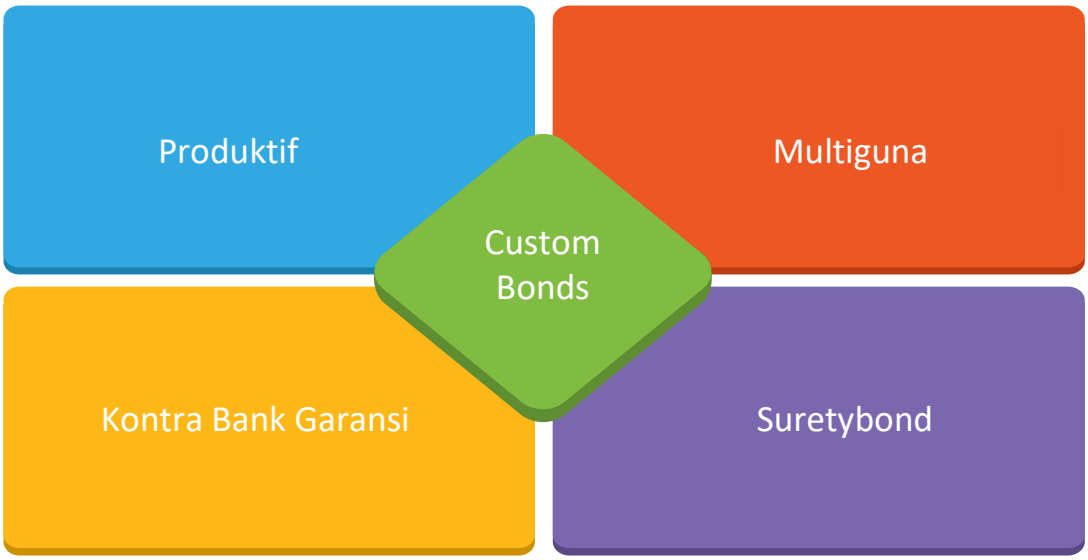

Multiguna

22 m
IJP Cash Basis

114,9 Ribu
Jumlah Terjamin

21%
Rasio Klaim

4,75 m
Laba Operasional

Produktif

17,28 m
IJP Cash Basis

42,5 Ribu
Jumlah Terjamin

25%
Rasio Klaim

3,53 m
Laba Operasional

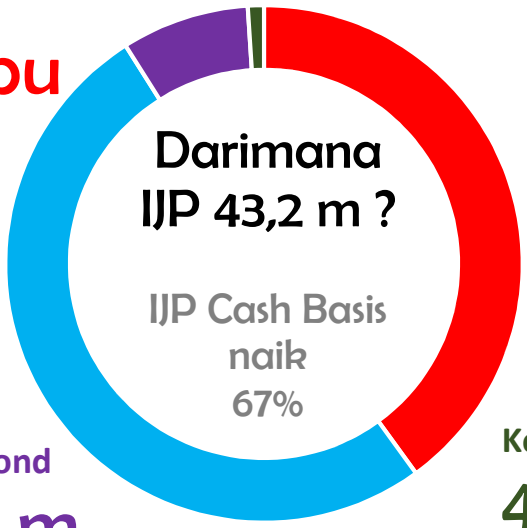

Suretybond

3,46 m
IJP Cash Basis

250
Jumlah Terjamin

37%
Rasio Klaim

591 Jt
Laba Operasional

Kontra Bank Garansi

432 Jt
IJP Cash Basis

50
Jumlah Terjamin

0%
Rasio Klaim

117 Jt
Laba Operasional

Lingkungan Kita

Kami beroperasi dalam lingkungan yang dinamis, berinvestasi untuk mengembangkan bisnis , memenuhi tuntutan perubahan pada kebutuhan pelanggan, persyaratan peraturan, dan teknologi. Hal ini menjadikan kami dapat melayani pelanggan dan mengelola klaim dengan standar yang dapat diandalkan

Digitalisasi & Teknologi

Teknologi memberikan peluang bagi perusahaan Penjaminan

- ✓ Teknologi digital mengubah bagaimana kebutuhan pelanggan dapat dipenuhi
- ✓ Data yang tersedia untuk perusahaan penjaminan meningkat ketika nasabah, terhubung oleh Teknologi
- ✓ Peningkatan data dan akses digital membawa risiko terhadap keamanan informasi

Respon kami

- ✓ Kami terus berinvestasi dan akan bermitra dengan perusahaan FinTech yang inovatif
- ✓ Kami terus melanjutkan program transformasi IT yang terintegrasi dan meningkatkan pelayanan digital kami ke nasabah

Rp 1 M
Investasi Sistem yg terintegrasi

Klaim

Meningkatnya klaim ratio (klaim berbanding IJP)

Klaim Penjaminan Kredit terus meningkat akibat gagal bayar/wanprestasi

Respon kami

- ✓ Mitigasi risiko dengan mengedapankan sikap kehati-hatian
- ✓ Transfer risiko dengan Reasuransi

Rp 2,77 M
Klaim Retensi Sendiri Tahun 2017

Regulasi

UU No 1 tentang Penjaminan tahun 2016 telah disahkan dan POJK terkait dengan UU tersebut telah disahkan pada tahun 2017

Respon kami

Memberikan peluang yang lebih besar kepada Jamkrida Jateng untuk berkembang, dan memberikan layanan penjaminan di seluruh Indonesia

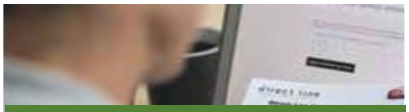

< 1%
Dari total landing kredit perbankan di Jawa Tengah

Cakupan Wilayah Penjaminan PT Jamkrida Jateng

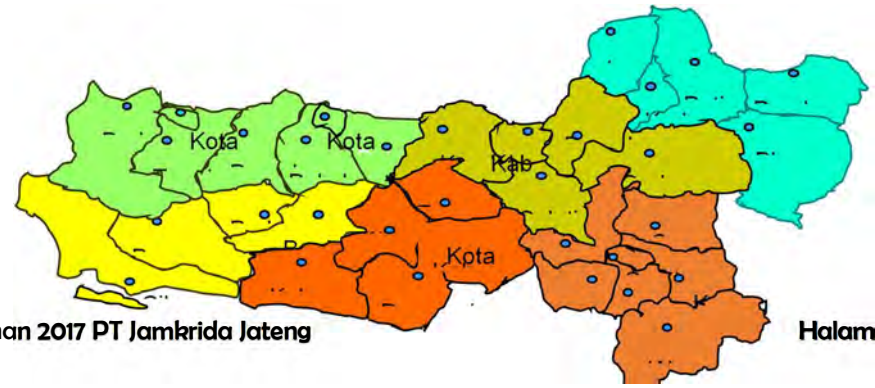

DEWAN KOMISARIS

Ir Sujarwanto Dwiatmoko, Msi

Komisaris Utama

Pria, kelahiran Klaten, lulus S1 dari Fakultas Teknik Geologi UPN "VETERAN" tahun 1984, S2 Magister Administrasi Publik Universitas Gajah Mada tahun 1990, dan saat ini masih menempuh S3 Program Doktor Administari Publik Universitas Diponegoro

Berbagai bidang telah ditangani diantaranya Kepala Balai Pertambangan dan Energi Wilayah Seayu, Kepala Sub Dinas Pengawasan, PLT Kepala Dinas Pertambangan & Energy Provinsi Jawa Tengah, Kepala Biro Produksi Setda Provinsi Jawa Tengah

Memimpin Dinas Koperasi & UMKM Jawa Tengah selama 5 tahun periode 2010 - 2015. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Jawa Tengah tahun 2016. Dan di tahun 2017 menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Mendapatkan Penghargaan dari Presiden RI Satya Lancana Karya Satya 10 tahun , Satya Lancana Karya 20 tahun dan Satya Lancana Pembangunan (bidang Koperasi dan UMKM)

Warsito Ellwein

Komisaris

Pria, kelahiran Klaten, Fasih berbahasa Jerman & Inggris, Aktif dalam organisasi pengembangan & pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris/direktur pelaksana tahun 1982-1987, Lembaga Pendidikan politik di Jerman dalam kurun waktu 1987 – 2010 diantaranya Lembaga Suedostasien, Deuthsche Stiftung & Lembaga Friedrich Naumann Stiftung, Visi beliau sangat jauh kedepan, keberpihakan terhadap UMKM dapat segera diwujudkan, "tindakan kita hari ini menentukan masa depan sampai ke anak cucu kita" Saat ini dipercaya sebagai Staff Ahli Gubenur provinsi Jawa Tengah bidang kedaulatan pangan.

DEWAN DIREKSI

M Nazir Siregar

Direktur Utama

Pria, Kelahiran Marbau – Sumatera Utara, Menyelesaikan Pendidikan S1 di STMA (Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi) Trisakti tahun 2004, dan telah lulus Sertifikasi Manajemen Risiko 3.

Pengalamanan di Industri Asuransi Jiwa selama 17 tahun lebih, berkarir di PT AJ Manulife Indonesia lebih dari 11 tahun dari tahun 1997 s.d tahun 2008, 6 tahun di Perusahaan asuransi Jiwa *Join Venture* dan Nasional dengan berbagai tanggung jawab dibidang Operasional, Marketing, Manajemen Risiko, dan Manajemen Strategi.

Mendapat Gelar :

- Ahli Asuransi Indonesia Jiwa (AAIJ) dari AAMAI
- Fellow Life Management Institute (FLMI) dari LOMA
- Ahli Asuransi Kesehatan (AAK) dari PAMJAKI
- Associate Customer Sevice (ACS) dari LOMA

Adi Nugroho

Direktur

Pria, Kelahiran Yogyakarta, menyelesaikan Pendidikan S1 di Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 1995, pendidikan S2 di STIE Mitra Indonesia Yogyakarta tahun 2001 dan telah lulus Sertifikasi Manajemen Risiko 3.

Pengalaman di Industri Penjaminan & Lembaga Keuangan selama 18 tahun lebih, Berkarir di Perum Jamkrindo periode 1996 – 2004, PT Permodalan Nasional Madani (persero) periode 2005 – 2011, Bank Andara periode 2011 - 2013 & PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah periode 2013 – 2014 dengan berbagai tanggung jawab di Bidang Operasional & Pemasaran

Mendapatkan penghargaan :

- Best Team Lending Se Indonesia dari PT Bank Andara tahun 2012
- Cluster Manager Terbaik se Jawa Tengah dari PT PNM (Persero) tahun 2009.

KEPALA DIVISI

Joko Haryanto

Kepada Divisi Customer Relation

Pria, Kelahiran Wonogiri – Jawa Tengah 23 Mei 1961, menyelesaikan Pendidikan Akademi di STIE AUB Pancasila Surakarta tahun 1985.

Berpengalaman di industri Asuransi selama lebih dari 29 tahun, antara lain pernah berkarir di PT. Asuransi Tugu Bunas General Insurance (BUN Group) Semarang, Jakarta dan Solo periode 1991 – 1997, PT. Asuransi Ikrar Loyd General Insurance (Bakrie Group) Semarang dan Jogya periode 1999 – 2004, PT. Asuransi Intra Asia General Insurance Semarang periode 2006 – 2012, dengan berbagai tanggung jawab di bidang Akseptasi, Keuangan, dan Marketing.

Menjalani Pendidikan profesi :

- Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia (LPAI) " Ujian Pendidikan Asuransi Tingkat Dasar "C" di Jakarta LULUS Tahun 1991.
- Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia (LPAI) " Ujian Pendidikan Asuransi Tingkat Lanjutan "B" Non Marine di Jakarta LULUS Tahun 1995.

Meidhi Suryadi

Kepala Divisi Finance Accounting & Investasi

Pria, kelahiran Surabaya 8 Mei 1963, menyelesaikan Pendidikan S1 Akuntansi Perbankan di UPN Veteran Jakarta tahun 1988.

Berpengalaman di bidang Asuransi dan Leasing selama kurang lebih 27 tahun, berkarir di PT. Air Multi Finance Corp periode 1990 – 1997, PT. Asuransi Jiwa Bakrie periode 2002 – 2010, PT. Asuransi Jiwa Recapital periode 2011 – 2016, dan 7 tahun di perusahaan Leasing & Contractor dengan berbagai tanggung jawab di bidang Accounting, Finance, HRD dan GA.

Mendapat Gelar :

Best Motivator Team Building di Perusahaan Bakrie Grup pada tahun 1998

Laporan Pelaksanaan Praktif Tata Kelola Perusahaan yang baik

Jamkrida Jateng menyadari bahwa sebagai perusahaan penyedia jasa keuangan, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan hal yang fundamental dalam mengoptimalkan nilai Perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan.

Penerapan GCG juga merupakan hal yang penting bagi Perusahaan dalam mencapai visi dan misinya serta berkembang secara berkesinambungan.

Tahun 2017 Jamkrida Jateng melakukan penilaian mandiri secara berkelanjutan atas penerapan tata kelola perusahaannya. Penilaian mandiri ini didasari POJK Nomor 3 /POJK.05/2017 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang baik bagi Lembaga Penjamin.

Berdasarkan penilaian mandiri, pada tahun 2017 Jamkrida Jateng telah menerapkan tata kelola perusahaan yang secara umum baik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola. Jamkria Jateng berkomitmen untuk terus meningkatkan komunikasi antara organ Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Jamkrida Jateng juga telah menyampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik kepada OJK. Seluruh laporan tersebut di atas digunakan oleh Jamkrida Jateng dalam mengembangkan pelaksanaan nilai-nilai GCG di dalam perusahaan . Untuk rincian lebih lanjut terkait laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan Jamkrida Jateng tahun 2017, silakan kunjungi website kami : www.jamkrida-jateng.co.id

A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

1. Jumlah, nama jabatan, tanggal lulus, dan nomor *fit and proper test*, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Direksi

Nama	M. Nazir Siregar	Adi Nugroho
Jabatan	Direktur Utama	Direktur
Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan (tahun)	6 Desember 2014 (4 tahun)	6 Desember 2014 (4 tahun)
Kewarganegaraan	Indonesia	Indonesia
Domisili	Perumahan Modern Hill Blok C1 No. 18 Pondok Cabe Tangerang Selatan	Jalan Kradenan Asri D-23, RT.002/ RW.011, Kel. Sukorejo, Kec. Gunungpati

Dewan Komisaris

Nama	Sujarwanto Dwiatmoko	Warsito Ellwein
Jabatan	Komisaris Utama	Komisaris
Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan (tahun)	6 Desember 2014 (4 tahun)	6 Desember 2014 (4 tahun)
Kewarganegaraan	Indonesia	Indonesia
Domisili	Jl. Candi Kalasan Selatan IV/ No.1028	Jati Padang RT.013/ RW. 002, Kel. Jati Padang, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Data perizinan bagi Dewan Komisaris berkewarganegaraan asing

Dewan Komisaris	
Nama	-
Jabatan	-
KITAS	-
Izin Kerja	-
Masa Berlaku	-

Dalam hal selama tahun pelaporan terdapat perubahan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS harus dicantumkan susunan keanggotaan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS sebelumnya dengan tabel sebagai berikut:

No	
Nama	-
Jabatan	-
Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	-
Tanggal Pemberhentian oleh RUPS	-

2. Tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Direksi

Bertanggung jawab penuh melaksanakan tugas untuk kepentingan Perusahaan dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.	menetapkan tata tertib Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perusahaan	membuka kantor cabang berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Mewakili Perusahaan di dalam Perusahaan maupun diluar pengadilan tentang segala hal dan di dalam segala kejadian, dan mengikat Perusahaan dengan pihak lain, serta melakukan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan dengan pembatasan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Daerah No. 2 tahun 2014, Peraturan Gubernur No. 38 tahun 2014 dan dalam Anggaran Dasar	membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aktiva tetap dan inventaris milik Perusahaan berdasarkan ketentuan;
Untuk hal-hal tertentu berhak untuk mengangkat satu orang atau lebih sebagai wakil atau kuasa dengan memberikan surat kuasa	menggadaikan aktiva tetap dan inventaris milik Perusahaan berdasarkan ketentuan;

mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan;	mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga atas nama Perusahaan
mengangkat dan memberhentikan Pegawai Perusahaan berdasarkan ketentuan;	

Dewan Komisaris

Mengawasi kepengurusan Perusahaan yang dijalankan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi

Dapat setiap waktu memberhentikan sementara seseorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku	Berhak untuk memasuki bangunan atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perusahaan dan berhak memeriksa semua pembukuan, dokumen-dokumen dan memeriksa dan mencocokkan keadaan kas dan bukti-bukti lain serta berhak atas informasi mengenai segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi

3. Rangkap jabatan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

a. Dewan Komisaris

No	1	2
Nama	Sujarwanto Dwiatmoko	Warsito Ellwein
Posisi di Lembaga Penjamin	Komisaris Utama	Komisaris
Posisi di Perusahaan Lain	1. Ketua 2. Kepala	Staff Khusus
Nama Perusahaan Lain Dimaksud	1. KPRI Bhakti Praja 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Bidang Usaha	1. Koperasi 2. Pemerintahan	Pemerintahan

4. Pelatihan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

Pelatihan yang terkait dengan peningkatan kemampuan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS dalam mencapai visi dan misi Lembaga Penjamin.

a. Direksi

No	Nama	*Workshop/training* /seminar	Tanggal	Penyelenggara Tempat
1.	M. NAZIR SIREGAR	1. Manajemen Risiko Level 2 2. Neo NLP 3. NLP Coaching 4. Manajemen Risiko Level 3 5. Public Speaking Mastery 6. Inhouse Training Revealing Your Genetic	08 Juli 2017 15 – 16 Juli 2017 22 – 23 Juli 2017 29 Juli 2017 22 – 23 Agustus 2017 27 November 2017	Jakarta Semarang Semarang Jakarta Jakarta Semarang
2.	ADI NUGROHO	1. Manajemen Risiko Level 3 2. Financial Modelling Fundamentals 3. Inhouse Training Revealing Your Genetic	08 Juli 2017 16 Maret 2017 27 November 2017	Jakarta Jakarta Semarang

b. Dewan Komisaris

No	Nama	*Workshop/training*/ seminar	Tanggal	Penyelenggara Tempat
1.	Sujarwanto Dwiatmoko	Enterprise Risk Governance Publik	6 Desember 2017	Yogyakarta

5. Pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi Dewan Komisaris dan DPS

Selama periode tahun buku 2017, kegiatan Dewan Komisaris masih difokuskan pada rapat yang telah diagendakan sebelumnya. Secara umum di dalam rapat tersebut Dewan Komisaris mendapatkan presentasi dan penjelasan dari Direksi mengenai aktifitas perusahaan sampai dengan rapat tersebut dilangsungkan. Direksi memaparkan laporan keuangan sementara, pencapaian perusahaan maupun rencana bisnis yang akan dilakukan selanjutnya.

Atas pemaparan dari Direksi di atas, Dewan Komisaris memberikan masukan, pandangan serta persetujuannya.

6. Frekuensi rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan rapat DPS yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun

a. Rapat Direksi

Rapat Direksi dilakukan 11 (sebelas) kali selama tahun 2017

No	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1.	M. NAZIR SIREGAR	11	0	100%

2.	ADI NUGROHO	11	0	100%

b. Dewan Komisaris

Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 38 Tahun 2014 Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat mengadakan Rapat.

Selama tahun 2017 terdapat 4 (empat) kali rapat antara dewan komisaris dengan direksi

No.	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1.	SUJARWANTO DWIATMOKO	4	0	100%
2.	WARSITO ELLWEIN	3	0	75%
3.	M. NAZIR SIREGAR	4	0	100%
4.	ADI NUGROHO	3	0	75%

B. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal

1. Fungsi kepatuhan

a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan

Adanya direksi yang membawahi fungsi kepatuhan dan satuan kerja atau pegawai yang bertanggung jawab kepada anggota direksi yang bersangkutan

b. Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan

Perusahaan telah mengangkat petugas fungsi kepatuhan sejak tahun 2015, dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, petugas kepatuhan berkoordinasi dengan Direktur Utama.

c. Pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

Petugas fungsi kepatuhan juga bertugas untuk monitoring ketentuan-ketentuan Perusahaan terkait kebijakan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Tingkat kesehatan keuangan Lembaga Penjamin

Total Gearing Ratio (Maksimum 40 kali)	14.71 kali
Gearing Ratio Produktif (Maksimum 20 kali)	4.09 kali
Usaha Produktif Minimal 20% dari Total Nilai Penjaminan	27.78 %
Current Ratio Minimal 120%	601.64 %

e. Kepemilikan unit kerja atau fungsi dalam menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen

No.	Penanggung Jawab	Pimpinan Unit Kerja/Pelaksana
1.	Kepala Bagian Pelayanan & IT	Pelayanan & IT

2. Fungsi auditor internal

Efektivitas dan cakupan pelaksanaan tugas auditor internal dalam menilai seluruh aspek dan unsur kegiatan.

a. Ruang lingkup pekerjaan audit

PT. Jamkrida-Jateng telah memiliki fungsi Internal Audit yang langsung bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Internal Audit merupakan Fungsi yang independen dan tidak memiliki kendali langsung terhadap unit bisnis atau kegiatan operasional yang menjadi obyek pemeriksaan. Fungsi Internal Audit akan terus berkoordinasi secara berkesinambungan dengan masing-masing unit bisnis yang berperan aktif dalam melakukan pemantauan atas perkembangan tindak lanjut temuan audit dan penyelesaiannya secara tepat waktu

b. Struktur dan kedudukan satuan kerja audit internal

Internal Audit berada langsung di bawah Direktur Utama.

c. Independensi auditor internal

Internal Audit di PT. Jamkrida Jateng merupakan fungsi yang independen karena berada langsung di bawah kendali Direktur Utama

d. Uraian tugas satuan kerja audit internal

Melakukan pemeriksaaan secara menyeluruh di semua fungsi kerja PT. Jamkrida Jateng

e. Laporan hasil pelaksanaan tugas internal audit

Laporan hasil pelaksanaan tugas internal audit dibuat sebulan sekali, sama seperti periode pemeriksaan internal audit. Laporan Internal Audit berisi rekomendasi perbaikan kinerja pada masing-masing fungsi dan tanggapan dari masing-masing fungsi terkait rekomendasi tersebut. Laporan Internal Audit disampaikan langsung oleh internal audit kepada direktur utama

3. Fungsi auditor eksternal

Fungsi auditor eksternal adalah memberikan kredibilitas atas laporan keuangan dan mengurangi risiko informasi bahwa laporan keuangan adalah bias, menyesatkan, tidak akurat, tidak lengkap, dan mengandung kesalahan material.

Kantor akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan Lembaga Penjamin selama 3 (tiga) tahun terakhir

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan (Perorangan) dan Nomor Pendaftaran di OJK	Biaya Auditor Ekternal
2015	KAP TARMIDZI ACHMAD	TARMIDZI ACHMAD	Rp. 35.000.000,-
2016	KAP TARMIDZI ACHMAD	TARMIDZI ACHMAD	Rp. 35.000.000,-
2017	KAP ACHMAD, RASYID, HISBULLAH & JERRY	J. ANWAR HASAN, CPA.	Rp. 40.000.000,-

C. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan tata kelola teknologi informasi

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Mengawasi dan memberikan nasihat manajemen terhadap strategi risiko perusahaan secara keseluruhan yaitu *risk apptetite*, profil risiko, preferensi risiko, toleransi risiko, batasan dan mitigasi.

Direksi Memastikan bahwa sistem manajemen risiko melakukan identifikasi, mengevaluasi dan mengendalikan risiko perusahaan. Sesuai dengan ruang lingkup dan tanggung jawabnya, Direksi bertanggung jawab untuk menerapkan strategi dan kebijakan di bidang manajemen risiko dan pengendalian internal serta memastikan kecukupan dan keberlanjutan dari waktu ke waktu dalam hal kelengkapan, fungsi dan efektivitas.

2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penggunaan teknologi informasi

Kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan memastikan Perusahaan patuh pada persyaratan peraturan yang berlaku dalam kerangka regulasi nasional. Kebijakan mendefinisikan secara khusus hal-hal sebagai berikut :

- Kategori risiko dimana Perusahaan berada dalam lingkup risiko tersebut
- Metode untuk mengukur dan menilai risiko-risiko tersebut
- Proses dan prosedur yang harus diikuti untuk memastikan mitigasi risiko yang efektif dan manajemennya

Sistem tata kelola yang dipakai, termasuk tugas dan tanggung jawab dan persyaratan pelaporan internal dan eksternal

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko pemanfaatan teknologi informasi

Kebijakan ini menetapkan prinsip-prinsip dan proses persyaratan minimum untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengelola dan memantau risiko saat ini dan risiko yang akan datang *(forward looking)* yang bisa timbul dari kegiatan yang dilakukan oleh Perusahaan. Kebijakan Manajemen Risiko memastikan manajemen risiko yang baik dan efektif, konsisten dengan 'selera risiko' *(risk appetite)* yang didefinisikan oleh Direksi

4. Struktur organisasi sistem informasi

Dalam struktur organisasi sistem informasi masuk ke dalam fungsi Pelayanan dan IT

5. Sistem pengendalian internal atas penggunaan teknologi informasi

Teknologi informasi yang digunakan di perusahaan adalah Aplikasi App-Line dan CMS. Untuk pengendalian internalnya adalah pada fungsi-fungsi tertentu hanya dapat melakukan akses fitur-fitur yang berhubungan dengan fungsi tersebut, satu fungsi tidak bisa mengakses fitur dari fungsi lainnya.

6. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh

Kerangka manajemen risiko didasarkan pada empat langkah proses :

- Identifikasi risiko yang didisain untuk memastikan bahwa risiko yang diidentifikasi oleh bisnis sudah dipertimbangkan dengan baik, *economic capital model* mereflesikan *profile* risiko perusahaan, risiko material dan dapat dikuantifikasi sudah diperhitungkan secara benar
- Pengukuran risiko, metode umum yang digunakan (kualitatif maupun kuantitatif) diaplikasikan untuk menyediakan penilaian risiko yang terintegrasi
- Manajemen Risiko dan kontrol, Perusahaan memastikan kontrol yang ketat dan manajemen yang ketat untuk memastikan bahwa kegiatan yang dijalankan konsisten dengan tingkat yang diinginkan
- Pemantauan risiko

D. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai

1. Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

a. Remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), kompensasi berbasis saham, tantiem dan bentuk remunerasi lainnya

Remunerasi yang diberikan Perusahaan kepada Direksi terdiri dari :	Sedangkan kepada Dewan Komisaris Perusahaan memberikan remunerasi sebagai berikut :
• Gaji Bulanan • Tunjangan Hari Raya • Bonus Akhir Tahun • Bonus Kinerja (Jasa Produksi) • Tunjangan Pertengahan Tahun	• Upah bulanan • Tunjangan Hari Raya • Biaya kehadiran dalam meeting • Bonus Akhir tahun • Bonus Kinerja (Jasa Produksi)

b. Fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura yaitu penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya

Fasilitas yang diberikan perusahaan kepada Direksi terdiri dari :	Fasilitas yang diberikan perusahaan kepada Dewan Komisaris terdiri dari :
▪ Mobil Dinas ▪ Rumah Dinas bagi direksi yang berasal dari luar wilayah kerja ▪ Supir/*Driver* ▪ BPJS Kesehatan ▪ BPJS Ketenagakerjaan ▪ Asuransi Jiwa ▪ Asuransi Kesehatan dari Perusahaan Asuransi ▪ Penggantian biaya transportasi ▪ Penggantian biaya komunikasi ▪ Cuti tahunan dan cuti masa kerja	▪ Asuransi Jiwa ▪ Asuransi Kesehatan dari Perusahaan Asuransi ▪ Tunjangan transportasi ▪ BPJS Ketenagakerjaan

2. Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun

a. Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang ditetapkan RUPS

Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris

b. Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota DPS dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain

Jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah paling sedikit mencakup jumlah Direksi, jumlah Dewan Komisaris, dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a

Jumlah yang diterima dalam satu tahun		Remunerasi *)	Fasilitas lain dalam bentuk natura **)
Direksi	Jumlah Direksi	2	1
	Nominal (Jutaan Rupiah)	Rp. 737.242.000,-	Rp. 127.900.000,-
Dewan Komisaris	Jumlah Dewan Komisaris	2	2
	Nominal (Jutaan Rupiah)	Rp. 291.722.400,-	Rp. 22.050.000,-
DPS	Jumlah DPS	-	-
	Nominal (Jutaan Rupiah)	-	-

Keterangan:

*) Termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), kompensasi berbasis saham, tantiem, dan bentuk remunerasi lainnya dalam bentuk non natura

**) Perumahan, trasportasi, asuransi kesehatan, dan sebagainya.

c. Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) tahun secara tunai	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris	Jumlah DPS
Di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)			
Di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) s.d Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)			
Di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s.d Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	2		
Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kebawah		2	

3. Rasio gaji tertinggi dan terendah

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai pada bulan terakhir tahun pelaporan.
Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut:

1)	rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	5.75
2)	rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan terendah	1.25
3)	rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah	1.25
4)	rasio gaji anggota Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	1.91

E. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham

No.	Nama	Kategori Kepemilikan Saham *)	Jumlah Nominal Kepemilikan Saham	Persentase Kepemilikan Saham
1.	M. NAZIR SIREGAR	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-
2.	ADI NUGROHO	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-
3.	SUJARWANTO DWIATMOKO	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-
4.	WARSITO ELLWEIN	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-
		D	-	-

Keterangan:
A. Lembaga Penjamin yang bersangkutan;
B. Lembaga penjamin lain;
C. Perusahaan jasa keuangan selain lembaga penjamin; dan
D. Perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.

F. Pengungkapan hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS dimaksud menjabat

1. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat

No.	Nama	Hubungan dengan	Bentuk Hubungan				Keterangan
			Keuangan		Keluarga		
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	
1.	M. NAZIR SIREGAR	Direksi lainnya		X		X	
		Dewan Komisaris		X		X	
		DPS		X		X	
		Pemegang saham		X		X	
2.	ADI NUGROHO	Direksi lainnya		X		X	
		Dewan Komisaris		X		X	
		DPS		X		X	
		Pemegang saham		X		X	

2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat

No.	Nama	Hubungan dengan	Bentuk Hubungan				Keterangan
			Keuangan		Keluarga		
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	
1.	SUJARWANTO DWIATMOKO	Direksi		X		X	
		Dewan Komisaris		X		X	
		DPS		X		X	
		Pemegang saham		X		X	
2.	WARSITO ELLWEIN	Direksi		X		X	
		Dewan Komisaris		X		X	
		DPS		X		X	
		Pemegang saham		X		X	

G. Pengungkapan hal penting lainn ya:

1. Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal

   Belum terdapat Pengunduran diri maupun pemberhenditan Auditor eksternal

2. Transaksi material dengan pihak terkait

   Tidak terdapat transaksi material dengan pihak terkait

3. Benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi

No.	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
1.	Tidak terdapat benturan kepentingan				

4. Informasi material lain mengenai Lembaga Penjamin

   Tidak terdapat informasi material lainnya

5. Jumlah penyimpangan internal (*internal fraud*)

Penyimpangan internal dalam 1 (satu) tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh		
	Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Anggota DPS	Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap
Total penyimpangan	-	-	-

Penyimpangan internal dalam 1 (satu) tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh		
	Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Anggota DPS	Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap
Telah diselesaikan	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di	-	-	-
Belum diupayakan	-	-	-
Telah ditindaklajuti melalui proses hukum	-	-	-

6. Permasalahan hukum

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap	X	X
Dalam proses penyelesaian di pengadilan dan di lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk kasus perdata	X	X
Total	X	X

Etika Bisnis Perusahaan

Secara sederhana yang dimaksud dengan etika dalam *Code of Conduct* ini adalah nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Dengan demikian etika bisnis bisa diartikan sebagai cara-cara baik untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, Perusahaan, industri dan juga masyarakat. Kesemuanya ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun Perusahaan di masyarakat.

1. Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

   Peraturan merupakan produk hukum yang wajib ditaati dan menjadi pedoman. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap hukum merupakan standar dari perilaku yang harus dijalankan. Perusahaan senantiasa membina hubungan yang sehat dan harmonis dengan Regulator, Legislator dan instansi yang terkait lainnya baik dari Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah. Perusahaan juga menghindari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam berhubungan dengan Regulator/ Pemerintah.

   Peraturan perundang-undangan yang diterapkan untuk perilaku bisnis Perusahaan ini mencakup Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Perusahaan, hukum bisnis, dan segala hukum serta peraturan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

   Memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan merupakan elemen utama yang harus dijaga dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap Insan Perusahaan. Ketentuan selanjutnya dapat mengacu pada peraturan Perusahaan yang berlaku.

2. Pemberian dan Penerimaan Hadiah, Suap dan Lainnya

   Pemberian dan/atau penerimaan Hadiah, Cindera Mata maupun Jamuan Bisnis dilakukan dalam rangka interaksi sosial dan pembinaan hubungan yang baik antar Perusahaan dan Mitra Usaha secara sehat dan wajar serta dapat dipertanggungjawabkan tanpa menimbulkan benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam menjalankan usaha Perusahaan.

   Perusahaan melarang tindakan-tindakan sebagai berikut:

   a. Suap
      Suap adalah suatu pemberian ataupun janji untuk memberi kepada seseorang atau pejabat yang akan mempengaruhi keputusan yang terkait dengan jabatannya antara lain dengan berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, untuk keuntungan si pemberi suap.
      Bentuk-bentuk suap dapat berupa pemberian uang, barang, fasilitas, pemberian atau penerimaan jabatan kepada keluarga pejabat ataupun bentuk dan fasilitas lainnya yang dapat merupakan imbalan.

   b. Pembayaran Tidak Wajar
      Pembayaran tidak wajar adalah praktek-praktek pembayaran khusus, hiburan dan sokongan kepada pihak-pihak di luar Perusahaan yang melebihi kewajaran/kelayakan yang berlaku di dunia bisnis.

3. Kepedulian Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja

   Pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting untuk keberhasilan aktivitas usaha Perusahaan. Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan dan memelihara perilaku yang dapat

mewujudkan keselamatan dan kesehatan kerja Insan Perusahaan. Oleh karena itu bagi setiap Insan Perusahaan dalam bekerja harus:

a. Mentaati setiap peraturan perundang-undangan dan/atau standar tentang keamanan dan keselamatan kesehatan kerja.
b. Mengutamakan tindakan pencegahan yaitu yang bersifat menghindari terjadinya kecelakaan.
c. Menjaga tata tertib dan disiplin agar tercipta lingkungan kerja yang aman dan teratur sehingga Perusahaan dapat mencapai tujuannya dengan baik.
d. Melakukan penanggulangan atas kejadian kecelakaan yang terjadi sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku dan senantiasa memiliki rencana penanggulangan keadaan darurat.
e. Melaporkan setiap insiden dan kecelakaan kerja yang terjadi kepada pimpinan unit masing-masing dan instansi berwenang terkait dalam batas waktu yang ditentukan.
f. Melakukan pemeriksaan, inspeksi dan evaluasi secara berkala terhadap semua sarana termasuk sumber daya, peralatan dan sistem deteksi secara seksama sesuai kewenangannya untuk memastikan kesiapannya.

4. Pemberian Kesempatan Yang Sama Kepada Karyawan Untuk Mendapatkan Pekerjaan, Promosi dan Pemberhentian Kerja

   1) Perusahaan menjunjung tinggi penegakkan hukum dan peraturan Perusahaan dengan konsisten tanpa membedakan ras, gender, agama dan jabatan.
   2) Perusahaan selalu menjunjung kesetaraan kerja termasuk di dalamnya larangan terhadap segala bentuk diskriminasi. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama dan setara serta perlakuan yang adil kepada seluruh Karyawan.

5. Standar Etika Dalam Berhubungan dengan *Stakeholders*

   Kepercayaan merupakan unsur penting untuk meningkatkan loyalitas Nasabah maupun pihak lain yang berhubungan dengan Perusahaan, selain kepercayaan, peningkatan pelayanan yang tinggi menjadikan nilai tambah tersendiri bagi Perusahaan. Untuk menciptakan harmonisasi dan iklim usaha yang terpercaya tersebut, Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya senantiasa bertindak professional, jujur, adil dan konsisten dalam memberikan pelayanan kepada *Stakeholders*.

   Landasan Perusahaan dalam membina hubungan dengan *Stakeholders* dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

   a. Hubungan Dengan Insan Perusahaan

      Dalam rangka mewujudkan hubungan yang berkualitas, adil serta dapat mendorong intensitas dan kualitas partisipasi Insan Perusahaan , Perusahaan akan memperlakukan Insan Perusahaan sebagai anggota Perusahaan dengan adil dengan cara sebagai berikut:

      1) Menghormati hak Insan Perusahaan serta akan selalu mengikutsertakan Insan Perusahaan dalam menetapkan kebijakan pengelolaan Karyawan secara konsisten sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
      2) Selalu mensosialisasikan semua peraturan, khususnya peraturan baru, kepada seluruh Insan Perusahaan;
      3) Menciptakan kesempatan kerja yang sama kepada seluruh Insan Perusahaan tanpa membedakan suku, ras, gender, agama;
      4) Menjunjung tinggi penegakkan hukum dan peraturan Perusahaan dengan konsisten tanpa membedakan suku, ras, gender, agama dan jabatan;
      5) Senantiasa berusaha menciptakan tempat kerja yang berwawasan lingkungan serta menjaga kesehatan dan keselamatan Karyawannya;
      6) Berusaha meningkatkan kesejahteraan Insan Perusahaan secara adil, layak dan transparan;
      7) Memberikan penilaian, penghargaan dan pembayaran remunerasi sesuai kinerja dan kompetensi Karyawan, baik secara korporasi, tim kerja maupun individu;
      8) Menghargai kreativitas, inovasi dan inisiatif Karyawan yang memberikan nilai tambah terhadap Perusahaan.

b. Hubungan Dengan Pemerintah

Perusahaan mempunyai komitmen untuk menjaga dan memelihara hubungan baik yang komunikatif dengan Pemerintah, dalam hal ini dengan setiap Jajaran Pemerintah yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perusahaan;

Hal-hal yang perlu diperhatikan Perusahaan dalam menjaga hubungan dengan Pemerintah adalah sebagai berikut:

1) Senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2) Membina hubungan yang sehat, harmonis dan konstruktif dengan Regulator, Legislator dan instansi terkait lainnya baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
3) Menghindari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam berhubungan dengan Pemerintah/Regulator.
4) Mematuhi dan mendukung peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aktivitas usaha Perusahaan termasuk di dalamnya ketaatan terhadap pembayaran pajak, retribusi, masalah ketenagakerjaan dan lingkungan hidup;
5) Mendukung program nasional maupun regional khususnya di bidang teknologi, pendidikan, sosial, ekonomi, dan budaya;
6) Tidak memanfaatkan hubungan baik dengan Pemerintah untuk memperoleh kesempatan bisnis dengan cara yang tidak etis;
7) Senantiasa berkomunikasi dan menjaga hubungan yang harmonis dan beretika berdasarkan nilai kejujuran, saling menghormati, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8) Menghindari penyalahgunaan hubungan kemitraan antara lain dengan memberikan jamuan dan hadiah untuk kepentingan pribadi.

c. Hubungan Dengan Pemegang Saham

1) Senantiasa berusaha meningkatkan nilai Perusahaan dengan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan kemampulabaan Perusahaan;
2) Senantiasa menghormati dan menjamin bahwa hak-hak Pemegang Saham sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan serta peraturan lain yang berlaku dapat terpenuhi dengan baik secara transparan, adil, tepat waktu dan lancar;
3) Senantiasa menjamin bahwa informasi material mengenai Perusahaan selalu diberikan dengan sejujur-jujurnya, tepat waktu dan teratur kepada Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan/ peratuan perundang-undangan yang berlaku;
4) Tidak melakukan suatu perbuatan untuk mencari keuntungan bagi pribadi dan pihak lain dengan menggunakan informasi Perusahaan yang bukan untuk kepentingan umum atau yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Agar hubungan dengan Pemegang Saham dapat terjalin dengan baik dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perusahaan menetapkan kebijakan sebagai berikut:

1) Setiap Pemegang Saham dan wakilnya yang sah berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perusahaan, yang berkaitan dengan diri Pemegang Saham yang bersangkutan pada waktu jam kerja kantor Perusahaan.
2) Memberikan informasi material yang lengkap dan akurat mengenai Perusahaan kepada setiap Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3) Membuat mekanisme RUPS yang memungkinkan setiap pemegang Saham dapat hadir dalam RUPS dan memberikan suaranya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4) Menjamin agar setiap Pemegang Saham mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5) Setiap Pemegang Saham harus memenuhi kewajiban dan melaksanakan tanggung jawabnya sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Hubungan Dengan Nasabah
   1) Senantiasa memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada Nasabah;
   2) Senantiasa meningkatkan pelayanan dengan menggunakan teknologi baru yang sesuai, dengan memperhatikan azas manfaat dan tepat guna bagi peningkatan pelayanan serta kenyamanan kerja dan peningkatan daya saing;
   3) Melaksanakan promosi yang berkesinambungan secara sehat, *fair*, jujur, mudah dipahami serta diterima oleh norma-norma masyarakat.

e. Hubungan Dengan Mitra Usaha
   Perusahaan dalam berhubungan dengan calon Mitra Usaha dan Mitra Kerja dilakukan secara professional, setara dan saling menguntungkan dengan mematuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:
   1) Senantiasa mengedepankan azas manfaat dengan memilih mitra usaha yang memberikan sinergi terbaik pada Perusahaan dan bebas KKN;
   2) Menghindari kerjasama dengan Mitra Usaha yang melakukan praktek usaha yang tidak etis;
   3) Selalu menjaga hubungan baik, setara, transparan dan saling menguntungkan dalam bekerjasama dengan para Mitra Usaha;
   4) Senantiasa melaksanakan hubungan kerja sesuai dengan nilai-nilai etika dan dalam batas-batas toleransi yang diperbolehkan oleh hukum;
   5) Senantiasa memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan kontrak;
   6) Mitra usaha wajib mematuhi semua ketentuan internal yang berlaku di Perusahaan.

f. Hubungan Dengan Masyarakat dan Lingkungan Sekitar
   1) Selalu membangun dan membina hubungan yang serasi dan harmonis serta berupaya memberikan manfaat kepada masyarakat dan lingkungan di sekitar tempat Perusahaan beroperasi;
   2) Senantiasa menjaga lingkungan hidup dengan meminimalkan dampak lingkungan dan mempertahankan keseimbangan ekosistem yang ada serta melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan;
   3) Menghindari segala perkataan, tindakan yang mengarah kepada diskriminasi masyarakat berdasar suku, agama, ras dan golongan.

6. Standar Etika Jajaran Manajemen dan Karyawan
   Kelangsungan hidup suatu Perusahan sangat ditentukan oleh kinerja dan citra Perusahaan. Kinerja dan citra Perusahaan itu sendiri sangat ditentukan oleh 2 (dua) hal, yaitu kemampuan (kapabilitas dan kompetensi) dan perilaku setiap Insan Perusahaan sebagai penggerak roda organisasi.

   a. Perilaku Sebagai Atasan Terhadap Bawahan
      1) Menghargai dan memperlakukan bawahan sebagai manusia seutuhnya dengan memperhatikan semua sisi kemanusiaannya;
      2) Selalu berkomunikasi secara santun, terbuka, jujur dan bertanggungjawab;
      3) Senantiasa meningkatkan pengetahuan bawahan dan menghargai kreativitas, inovasi dan inisiatif bawahan;
      4) Melibatkan dan mempertimbangkan masukan dari bawahan dalam proses pengambilan keputusan serta menghargai dan menerima perbedaan pendapat dan kritik yang membangun;
      5) Memberi keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari, sesuai kata dengan perbuatan;
      6) Menjadi pelopor pembaharuan dan manajemen perubahan;
      7) Mendorong budaya kepatuhan terhadap pedoman perilaku dan kebijakan Perusahaan;
      8) Mendorong/memotivasi bawahan untuk berprestasi dan secara bersama-sama mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan;
      9) Melakukan koreksi atau teguran ke bawahan secara konstruktif, adil dan tanpa mematahkan semangat kerja yang bersangkutan;

10) Memberikan kesempatan yang sama kepada bawahan untuk mengembangkan karirnya tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, gender dan golongan;
11) Menanggapi setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin dan menindaklanjutinya secara adil dan transparansi sesuai peraturan Perusahaan;
12) Menjaga keutuhan dan kekompakan seluruh Insan Perusahaan dengan menghindari persaingan yang tidak sehat serta menghindari pengkotakan antar bagian;
13) Tidak melakukan intimidasi atau tekanan, penghinaan terhadap bawahannya.

b. Perilaku Sebagai Bawahan Terhadap Atasan
1) Bekerja jujur dan professional dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab;
2) Bersikap dan bertingkah laku santun terhadap atasan dan sesama Insan Perusahaan;
3) Selalu berusaha meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas;
4) Memberikan saran dan masukan yang positif kepada atasan;
5) Berani dan bebas mengeluarkan pendapat secara santun dalam mendiskusikan kebijakan atasan yang tidak sesuai dengan aturan dan/atau tujuan Perusahaan dan menyampaikan saran untuk perbaikan;
6) Tidak membahas secara negatif kebijakan atasan dengan sesama bawahan yang berpotensi mengundang fitnah dan kontra produktif terhadap kinerja Perusahaan;
7) Mematuhi peraturan Perusahaan dan menginformasikan kepada atasan bila terdapat indikasi penyimpangan;
8) Patuh dan konsekuen terhadap hukum, kebijakan (*policy*), dan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang sudah ditetapkan;
9) Tidak melakukan tindakan yang di luar kewenangannya;
10) Mematuhi dan menghormati kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

c. Perilaku Sebagai Rekan Kerja
1) Selalu menjaga perilaku sopan dan santun baik dalam maupun di luar pekerjaan;
2) Mengembangkan kemampuan dan keterampilan untuk bekerja dalam kelompok demi kemajuan Perusahaan;
3) Memiliki semangat kerja sama yang tinggi dan selalu siap membantu rekan ataupun unit kerja lain untuk kebaikan Perusahaan;
4) Bersedia berbagi pengetahuan dan keterampilan kepada rekan kerja lainnya tanpa merasa takut tersaingi;
5) Menghargai orang lain, tidak meremehkan dan membeda-bedakan satu dengan lainnya;
6) Menerima setiap masukan dan saran yang diberikan untuk perbaikan diri dan peningkatan kinerja;
7) Menciptakan keterbukaan informasi sesama rekan kerja dan antar unit kerja untuk mendukung kerja sama dan koordinasi yang baik demi kemajuan Perusahaan dengan tidak melanggar Perjanjian Kerja Bersama antara Perusahaan dan Karyawan yaitu menyimpan rahasia Perusahaan dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
8) Bersikap terbuka, simpatik dan membantu sesama rekan, saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain, serta dapat menerima perbedaan pendapat dengan baik;
9) Memiliki semangat persaingan yang sehat untuk memacu prestasi kerja secara maksimal;
10) Menghindari tindakan dan ucapan yang mengandung unsur intimidasi, penghinaan, sikap mengejek, memfitnah dan merendahkan teman, serta saling menjatuhkan terhadap sesame rekan kerja;
11) Bekerja dengan harmonis berdasarkan dedikasi dan kepercayaan bersama untuk mecapai tujuan bersama.

7. Hak Atas Kekayaan Intelektual
   a. Menghormati hak kekayaan intelektual pihak lain.
   b. Berpartisipasi secara aktif untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual milik Perusahaan.
   c. Insan Perusahaan yang turut serta/bekerja dalam pengembangan suatu proses atau produk yang akan digunakan oleh Perusahaan, atau Insan Perusahaan yang memiliki hak atas hasil karya tersebut, harus memperlakukan informasi yang terkait dengan proses atau produk tersebut sebagai milik Perusahaan baik selama masa kerja maupun setelah Insan Perusahaan tidak bekerja lagi untuk Perusahaan.
   d. Seluruh Insan Perusahaan harus menginformasikan hasil karya yang dihasilkannya baik selama maupun di luar jam kerja, jika hasil karya tersebut terkait dengan bisnis atau operasi Perusahaan.

KILAS BALIK PERUSAHAAN

Kunjungan Kerja Ketua DPRD Jawa Tengah, Ketua Komisi C dan Jamkrida Jateng ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tanggal 16 Maret 2017

Senin 22 Mei 2017 bertempat di Quest Hotel Semarang, diadakan Sosialisasi Program Penjaminan Kredit beserta penandatanganan Kerjasama penjaminan antara PT. Mitra Harmoni Insurance Broker dengan PT. Jamkrida Jateng

Pada hari Kamis 21 Desember 2017 bertempat di Hotel Santika Semarang, PT. Jamkrida Jateng menandatangani MOU dengan LPDB-KUMKM guna mempercepat penyaluran dana bergulir di Provinsi Jawa Tengah.

Sepeda sehat, Sinergi BUMD dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah, Purworejo, 12 November 2017

Sebanyak 33 Karyawan Jamkrida Jateng mengikuti training pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Senin (27/11/2017).

PENGHARGAAN DAN PENGAKUAN

Pada hari Jumat, 24 November 2017 PT. Jamkrida Jateng menerima penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sebagai Badan Publik Cukup Informatif. Pemberian penghargaan ini dalam rangka kompetisi Keterbukaan Informasi Publik yang diadakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017.

AKTIVITAS TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Pada hari Rabu, 21 Juni 2017, PT Jamkrida Jateng mengadakan acara Buka Puasa Bersama di Panti Asuhan Tarbiyatul Hasanah yang berlokasi di Jl. H Suradi RT/RW 04/03 Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik Semarang

Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi dan berbagi dengan sesama dibulan Ramadhan

Binaan UMKM Jamkrida Jateng

Penyerahan Hewan Kurban di Gunung Pati Semarang

Laporan Keuangan

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2017
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain

	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
		Rp	Rp
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	3a,3d, 4	36,902,421,969	24,391,282,083
Investasi	3d, 5		
Deposito Berjangka		78,700,000,000	54,950,000,000
Efek - Tersedia Untuk Dijual		27,571,500,000	5,391,916,000
Piutang IJP	3d, 6	1,629,467,185	507,225,716
Piutang Co-guarentee/ Reasuransi / Penjaminan Ulang	3d,3e, 7	2,044,670,641	877,199,439
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	8	1,815,850,593	228,733,561
Biaya Dibayar Dimuka	3f, 9	355,375,000	150,000,000
Pajak Dibayar Dimuka	16	16,764,426	-
Aset lancar lain-lain		54,781,944	-
Jumlah Aset Lancar		**149,090,831,758**	**86,496,356,799**
Aset Tidak Lancar			
Beban dibayar dimuka	12	19,928,952,967	-
Aset tetap (Setelah dikurangi akumulasi penyusutan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp 662.544.875 dan Rp 229.708.882).	3g, 3h, 10	2,542,493,220	863,710,842
Aset tidak berwujud - bersih	3i,11	1,215,802,029	614,618,332
Aset pajak tangguhan - bersih		102,008,286	-
Aset lain-lain - bersih	13	98,476,515	128,734,243
Jumlah Aset Tidak Lancar		**23,887,733,017**	**1,607,063,417**
JUMLAH ASET		**172,978,564,775**	**88,103,420,216**

	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
		Rp	Rp
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
LIABILITAS LANCAR			
Utang Klaim	3d,14	1,188,491,272	-
IJP yang Ditangguhkan	15	12,066,427,275	933,403,725
Utang Pajak	3d,16	438,209,783	1,424,915,211
Utang Premi Reasuransi	3d,17	1,263,117,587	1,242,319,776
Utang Akuisisi	3d,18	1,012,191,076	551,408,885
Utang IJP Co-guarantee / Penjaminan Ulang	3d,19	65,415,997	709,052,691
Biaya Yang Masih Harus Dibayar		785,000,000	-
Cadangan Klaim	3d,20	5,303,039,187	4,837,927,258
Liabilitas Lancar Lain - Lain	3d,21	2,658,880,347	2,260,214,278
Jumlah Liabilitas Lancar		**24,780,772,524**	**11,959,241,823**
LIABILITAS TIDAK LANCAR			
IJP yang Ditangguhkan	22	18,377,722,366	951,114,239
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	3k, 23	1,628,735,567	1,105,306,553
Jumlah Liabilitas Tidak Lancar		**20,006,457,933**	**2,056,420,792**
JUMLAH LIABILITAS		**44,787,230,457**	**14,015,662,615**
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal	3b, 24	121,100,000,000	70,700,000,000
Cadangan	25		
a. Cadangan Umum		996,788,490	260,348,348
b. Cadangan Tujuan		-	67,095,977
Laba Ditahan		505,682,346	114,552,706
Laba (Rugi) Tahun Berjalan		5,582,372,874	2,945,760,569
Pendapatan Konprehensif lainnya		6,490,607	-
JUMLAH EKUITAS		**128,191,334,317**	**74,087,757,600**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**172,978,564,775**	**88,103,420,216**

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
Tahun Berakhir 31 Desember 2017
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain

	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
		Rp	Rp
Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan	3j, 26		
Imbal Jasa Penjaminan Bruto		15,053,749,346	28,261,574,966
IJP Co-guarantee/IJPU/Premi Reasuransi		(2,541,676,079)	(12,080,460,427)
Pendapatan/Beban Akuisisi Penjaminan		(748,423,982)	(6,164,896,781)
JUMLAH PENDAPATAN IJP - BERSIH		11,763,649,285	10,016,217,758
Beban Klaim	3j, 27		
Beban Klaim Bruto		(12,956,044,099)	(3,971,868,245)
Klaim Co-guarantee/Penjaminan Ulang/Reasuransi		10,186,894,690	2,909,360,693
Kenaikan/Penurunan Cadangan Klaim		(465,111,929)	(4,033,441,384)
Beban Klaim Lainnya		(198,077,250)	-
Jumlah Beban Klaim		(3,432,338,588)	(5,095,948,936)
Pendapatan Penjaminan Bersih		8,331,310,697	4,920,268,822
Pendapatan Operasional Lainnya	3j, 28		
Pendapatan Bunga		8,051,122,015	3,500,292,689
Pendapatan Investasi Selain Bunga		897,344,846	-
Peningkatan Nilai Wajar Aset Keuangan		-	-
Pendapatan Operasional Lain - Lain		490,995,975	-
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya		9,439,462,836	3,500,292,689
Beban Operasional Lainnya	3j, 29		
Beban Gaji dan Pegawai		(4,972,516,124)	(4,053,714,510)
Beban Penyusutan dan Amortisasi		(497,383,230)	(298,426,613)
Beban Administrasi dan Umum Lainnya		(5,419,622,569)	(2,065,453,532)
Beban Operasional Lain - Lain		(409,863,990)	(659,276,182)
Jumlah Beban Operasional Lainnya		(11,299,385,913)	(7,076,870,837)
Laba (Rugi) Operasional		6,471,387,620	1,343,690,674

Pendapatan (Beban) Non Operasional	3j, 30		
Pendapatan Non Operasional		997,517,056	2,602,862,252
Beban Non Operasional		(25,924,388)	(18,872,166)
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional		**971,592,668**	**2,583,990,086**
Laba (Rugi) Sebelum Pajak		**7,442,980,288**	**3,927,680,760**
Taksiran Pajak Penghasilan	3k, 16		
Pajak kini			
a. Pajak Final		1,604,647,609	981,920,190
b.Pajak Non Final		360,131,627	-
Pajak Tangguhan		(104,171,822)	-
Jumlah Taksiran Pajak Penghasilan		**1,860,607,414**	**981,920,190**
Laba Bersih		**5,582,372,874**	**2,945,760,570**
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA	3j		
Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke Rugi Laba			
Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasca kerja-neto		(51,778,726)	-
Pos yang akan direklasifikasikan ke Rugi Laba		-	-
Bunga obligasi belum terealisasi-neto		58,269,333	
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF		**5,588,863,481**	**2,945,760,570**

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN ARUS KAS
Tahun Berakhir 31 Desember 2017
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain

	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
		Rp	Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Laba komprehensif		5,588,863,481	2,945,760,570
Penyesuaian :			
Depresiasi aset tetap		362,835,993	298,426,613
Perubahan:			
Piutang IJP		(1,122,241,469)	(507,225,716)
Piutang Co-guarentee/Reasuransi/Penjaminan Ulang		(1,167,471,202)	(877,199,439)
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		(1,587,117,032)	(123,555,800)
Biaya Dibayar Dimuka		(205,375,000)	(150,000,000)
Pajak Dibayar Dimuka		(16,764,426)	-
Aset Pajak Tangguhan		(102,008,286)	-
Aset lancar lain-lain		(54,781,944)	-
Beban dibayar dimuka		(19,928,952,967)	-
Aset lain-lain - bersih		30,257,728	(38,685,000)
Utang Klaim		1,188,491,272	-
IJP yang Ditangguhkan		11,133,023,550	485,400,748
Utang Pajak		(986,705,428)	1,077,784,081
Utang Premi Reasuransi		20,797,811	1,242,319,776
Utang Akuisisi		460,782,191	(236,570,264)
Utang IJP Co-guarantee / Penjaminan Ulang		(643,636,694)	(790,996,207)
Biaya Yang Masih Harus Dibayar		785,000,000	-
Cadangan Klaim		465,111,929	4,033,441,384
Liabilitas Lancar Lain - Lain		398,666,068	2,260,214,279
IJP yang Ditangguhkan		17,426,608,127	329,256,261
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja		523,429,014	1,105,306,553
Arus kas bersih (digunakan)/diperoleh dari aktivitas operasi		**12,568,812,717**	**11,053,677,838**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Pencairan/(Penempatan) Investasi		(45,929,584,000)	(14,541,916,000)
Perolehan aset tetap		(2,041,618,370)	(553,288,825)
Perolehan Aset tidak berwujud		(601,183,697)	510,149,062
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		**(48,572,386,067)**	**(14,585,055,763)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			

Modal disetor		50,400,000,000	20,200,000,000
Cadangan			327,444,325
Pembayaran deviden dan Jasa Produksi		(1,885,286,764)	(926,840,684)
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan		48,514,713,236	19,600,603,641
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		**12,511,139,886**	**16,069,225,715**
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		**24,391,282,083**	**8,322,056,368**
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	4	**36,902,421,969**	**24,391,282,083**

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Tahun Berakhir 31 Desember 2017
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain

	Modal saham ditempatkan dan disetor penuh	Saldo laba		Jumlah
		Telah ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya	
Saldo 1 Januari 2016	**50,500,000,000**		**1,041,393,390**	**51,541,393,390**
Setoran modal				
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	20,000,000,000	-	-	20,000,000,000
Pemerintah Kabupaten Temanggung	200,000,000	-	-	200,000,000
Cadangan			(1,041,393,390)	(1,041,393,390)
Deviden	-	572,766,365	(572,766,365)	-
Jasa produksi	-	93,725,405	(26,629,994)	67,095,411
Dana kesejahteraan	-	72,897,537	-	72,897,537
Dana sosial	-	41,655,736	-	41,655,736
Umum	-	260,348,348	-	260,348,348
Laba tahun berjalan	-	-	**2,945,760,570**	**2,945,760,570**
Saldo 31 Desember 2016	**70,700,000,000**	**1,041,393,390**	**2,346,364,211**	**74,087,757,601**
Setoran modal				
PemProv Jawa Tengah	50,000,000,000	-	-	50,000,000,000
PemKab Temanggung	200,000,000	-	-	200,000,000
PemKab Grobogan	200,000,000	-	-	200,000,000
Cadangan			(2,945,760,570)	(2,945,760,570)
Deviden	-	1,620,168,313	(1,620,168,313)	-
Jasa produksi	-	265,118,451	(265,118,451)	-
Jasa produksi 2016	-	-	-	(67,095,411)
Laba ditahan	-	-	-	67,095,411
Dana kesejahteraan	-	206,203,240		206,203,240
Dana sosial	-	117,830,423		117,830,423
Umum	-	736,440,142		736,440,142
Pendapatan komprehensif lain - neto	-	-	6,490,607	6,490,607
Laba tahun berjalan	-		5,582,372,874	5,582,372,874
Saldo 31 Desember 2017	**121,100,000,000**	**3,987,153,959**	**3,104,180,359**	**128,191,334,317**

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017
(Dinyatakan Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

DASAR PENYUSUNAN

a. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 147A/SK/DIR/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 telah diputuskan bahwa Perusahaan mulai tanggal 18 Desember 2017 mulai menerapkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia yang sebelumnya menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Laporan keuangan tahun 2016 telah diterima dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan deviden pun telah dibagikan. Oleh karena itu maka keputusan ini berlaku secara prospekti kedepan dan bila ada koreksi atas penerapan kebijakan tersebut maka dampaknya akan dikoreksi di tahun berjalan.

b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep akrual, dan dasar pengukuran dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang disajikan dengan menggunakan dasar seperti yang disebutkan dalam catatan terkait.

Laporan arus kas, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung.

Mata uang pelaporan yang digunakan pada laporan keuangan adalah Rupiah (Rp), yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

c. Pernyataan Kepatuhan Terhadap SAK

Manajemen Perusahaan menyatakan bahwa laporan keuangan tahun 2017 dengan angka komparatif 2016 telah disajikan sesuai dengan SAK dan telah memenuhi semua persyaratannya.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Kebijakan akuntansi yang ditetapkan di bawah ini telah diterapkan secara konsisten untuk seluruh periode disajikan dalam laporan keuangan.

a. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, kas di bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak dijadikan sebagai jaminan pinjaman serta tanpa pembatasan penggunaan.

Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas dan kas di bank dan deposito berjangka seperti disebutkan di atas, dikurangi overdraft, jika ada.

Deposito berjangka dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan tapi tidak melebihi 1 (satu) tahun, deposito berjangka kurang dari 3 (tiga) bulan namun dijaminkan dan investasi dalam reksadana diklasifikasikan sebagai akun "Aset Keuangan Lancar Lainnya" pada laporan posisi keuangan

b. Transaksi dengan Pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa

Sesuai dengan PSAK No. 7 (Revisi 2014) tentang "Pengungkapan pihak-pihak yang berelasi", yang dimaksud dengan pihak yang berelasi adalah orang atau entitas yang berelasi dengan entitas pelapor sebagai berikut:

1 Orang atau anggota keluarga terdekatnya berelasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama terhadap entitas pelapor;

ii. Memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor; atauii. Memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor; atau

iii. Personal manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk pelapor

2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi hal-hal sebagai berikut :

i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);

ii. Suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama bagi entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, dimana entitas lain tersebut adalah anggotanya);

iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;

iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.

v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari suatu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor;

vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a)

vii. Orang yang diidentifikasi, dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau anggota manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas)

Perusahaan mengungkapkan transaksi dengan pihak- pihak berelasi selama periode yang dicakup dalam laporan keuangan, kecuali terkait dengan relasinya dengan pemerintah.

c. Mata Uang Pelaporan, Transaksi Dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Mata uang pelaporan yang digunakan oleh Perusahaan adalah mata uang Rupiah. Mata uang Rupiah digunakan karena memenuhi indikator sebagai mata uang fungsional, yaitu indikator arus kas, indikator harga jual dan indikator biaya.

Pembukuan Perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Sedangkan transaksi dalam mata uang asing dijabarkan kedalam Rupiah dengan kurs tunai (spot rate) pada saat transaksi terjadi. Tanggal transaksi adalah tanggal dimana transaksi pertama kali memenuhi syarat pengukuran sesuai dengan SAK . Pada tanggal pelaporan, saldo aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan kedalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut.

Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul dibebankan atau dikreditkan pada laporan laba (rugi) tahun berjalan.

d. Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset Keuangan

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, dan aset keuangan tersedia untuk dijual.

Nilai Wajar melalui Laba Rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset keuangan yang diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diperdagangkan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti adanya kecenderungan ambil untung dalam jangka pendek. Saham yang diperdagangkan pada bursa saham yang dimiliki untuk diperjual belikan termasuk dalam klasifikasi asset keuangan ini.

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak memiliki kuotasi di pasar aktif.

Dimiliki hingga jatuh tempo

Merupakan Aset keuangan non-derivatif yang diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo jika Perusahaan memiliki intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Aset keuangan ini antara lain Wesel Tagih , Commercial Paper dan sebagainya.

Tersedia untuk dijual

Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif. Obligasi dan saham milik Perusahaan yang tercatat di bursa dan diperdagangkan pada pasar aktif diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi adalah liabilitas keuangan yang diperdagangkan dan jika perolehannya ditujukan untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti adanya kecenderungan pengambilan keuntungan dalam jangka pendek

Liabilitas keuangan Perusahaan terdiri dari utang klaim, utang co-guarantee, utang pajak, utang akuisisi, beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain.

Pengukuran Awal Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Perusahaan mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut

Akan tetapi, jika nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal berbeda dari harga transaksinya, maka entitas menerapkan nilai wajar sebagai berikut.

a. Nilai wajar dibuktikan dengan harga kuotasi di pasar aktif untuk aset atau liabilitas keuangan yang identik atau berdasarkan tehnik penilaian yang hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi. Perusahaan mengakui perbedaan antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi sebgai keuntungan atau kerugian.

b. Dalam kasus lain, diperkenankan untuk menangguhkan selisih antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi. Setelah pengakuan awal, Perusahaan mengakui bahwa selisih yang ditangguhkan sebagai keuntungan atau kerugian hanya sebatas keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan dalam faktor (termasuk waktu) yang akan dipertimbangkan pelaku pasar dalam memperhitungkan nilai aset atau liabilitas .

Pengukuran Aset Keuangan Setelah Pengakuan Awal
Setelah pengakuan awal, entitas mengukur aset keuangan, termasuk derivatif yang diakui sebagai aset, pada nilai wajarnya, tanpa dikurangi biaya transaksi yang mungkin timbul pada penjualan atau pelepasan lain, kecuali untuk aset keuangan berikut ini:

1) **Pinjaman yang diberikan dan piutang, Diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif**
   Diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif

2) **Investasi dimiliki hingga jatuh tempo**
   Investasi dimiliki hingga jatuh tempo, diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif

3) **Aset keuangan tersedia untuk dijual**
   Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar

Pengukuran Liabilitas Keuangan Setelah Pengakuan Awal
Setelah pengakuan awal, entitas mengukur liaiblitias keuangan, biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif, kecuali untuk:

1. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi,

2. Pengalihan yang tidak diakui sebagai penghentian pengakuan, karena Perusahaan secara substantial masih memiliki seluruh resiko, atau jika Perusahaan masih mengakui asset dikarenakan adanya keterlibatan berkelanjutan dengan asset tersebut, maka Perusahaan juga mengakui liabilitas terkait,

3. Liablitias keuangan yang timbul dari kontrak jaminan keuangan,

4. Komitment untuk menyediakan pinjaman dibawah suku bunga pasar.

Keuntungan dan Kerugian
Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan yang bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai, diakui sebagai berikut:

a. Keuntungan atau kerugian atas aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diakui dalam laba rugi.

b. Keuntungan atau kerugian atas aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komrehensif lain di reklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi. Akan tetapi bunga yang dihitung menggunakan suku bunga efektif diakui dalam laba rugi.

c. Dividen atas instrumen ekuitas yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual diakui dalam laba rugi ketika ditetapkan hak entitas untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut.

Aset dan liabilitas keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi ketika asset atau liabilitas keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, dan melalui proses amortisasi.

Pendapatan bunga atas aset keuangan yang tersedia untuk dijual dihitung dengan menggunakan metode bunga efektif yang diakui pada laporan laba rugi sebagai "pendapatan bunga"

Penghentian pengakuan
Perusahaan menghentikan aset keuangan jika dan hanya jika, hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau Perusahaan mengalihkan asset keuangan dan pengalihan tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan

Perusahaan mengalihkan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa, atau pada saat Perusahaan mentransfer seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi dimana Perusahaan secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan yang ditransfer. Setiap hak atau liabilitas atas diakui sebagai aset atau liabilitas secara terpisah

Perusahaan menghentikan aset keuangan jika dan hanya jika, hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau Perusahaan mengalihkan asset keuangan dan pengalihan tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan

Saling Hapus
Aset dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Perusahaan memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan

Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan
Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan) dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

1. **Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi**
   Jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dan aset keuangan tersebut Nilai tercatat aset tersebut dikurangi baik secara langsung maupun melalui akun penyisihan kerugian penurunan nilai dan beban kerugian diakui pada laporan laba rugi.

   Perusahaan pertama kali menentukan bahwa terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas asset keuangan yang signifikan secara individual, dan secara individual atau kolektif untuk asset keuangan yang tidak signifikan secara individual. Jika Perusahaan menentukan bahwa tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai asset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas dari asset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Perusahaan memasukkan asset tersebut kedalam asset keuangan yang memiliki karaktreristik resiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunann nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif

   Jika pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur) maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya, dibalik baik secara langsung, atau dengan menyesuaikan akun cadangan. Pemulihan tersebut tidak dapat mengakibatkan jumlah tercatat asset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pembalikan dilakukan. Jumlah pembalikan asset keuangan diakui dalam laba rugi.

2. **Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi**

Jika penurunan dalam nilai wajar atas asset keuangan tersedia untuk dijual telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terdapat bukti obyektif bahwa asset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi meskipun asset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya.

Jumlah kerugian kumulatif yang direklasifikasikan dari ekuitas ke laba rugi merupakan selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi) dan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui dalam laba rugi.

Jika pada periode berikutnya, nilai wajar instrumen utang yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual meningkat dan peningkatan tersebut dapat secara obyektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai pada laporan laba rugi, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dibalik melalui laporan laba rugi.

e. **Piutang Co - Guarantee/ Reasuransi**

Pembayaran klaim ke penerima jaminan yang menjadi tanggungan mitra co-guarantee dan mitra re-asuransi dicatat sebagai piutang dalam penyelesaian.
Pengakuan piutang dalam penyelesaian dilakukan setiap terjadi pembayaran klaim yang menjadi tanggungan mitra co-guarantee dan mitra re-asuransi.
Piutang dalam penyelesaian diakui sebagai piutang re-asuransi pada saat diterbitkannya SOA (Statement of Account), namun pembayaran belum dilakukan.

f. **Beban dibayar dimuka**

Beban dialokasikan sesuai dengan masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

Beban co-guarantee, beban re asuransi, diamortisasi secara proporsional mengikuti pola pengakuan pendapatan imbalan jasa penjaminan.
Fee based income, beban bank-pelaksana dan beban akuisisi agen dibayar dimuka diamortisasi sesuai rata-rata jangka waktu penjaminan.

g. **Aset Tetap**

Aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Biaya perolehan meliputi harga beli aset tetap termasuk biaya-biaya yang diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang siap digunakan. Pajak-pajak yang dapat dikreditkan dan semua diskon dikurangkan dalam menentukan biaya perolehan. Revaluasi aset tetap tidak diperkenankan, kecuali dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Penyusutan dimulai pada saat aset tetap tersedia untuk digunakan. Penyusutan diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi, kecuali memenuhi syarat untuk dikapitalisasi sebagai perolehan suatu aset berdasarkan SAK.

Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (straight line method) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis dengan rincian sebagai berikut:

Peralatan
Tahun / years
4 - 5

Biaya perbaikan dan perawatan dibebankan langsung ke laporan laba rugi pada saat terjadinya biaya-biaya tersebut. Biaya-biaya yang sifatnya meningkatkan kondisi aset secara signifikan dikapitalisasi. Apabila suatu aset tetap tidak lagi digunakan atau dijual, harga perolehan berikut akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari kelompok aset tetap dan keuntungan atau kerugian yang terjadi di perhitungkan dalam laporan laba rugi untuk periode (tahun) bersangkutan.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap, akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan.

h. Penurunan Nilai Aset

Perusahaan pada setiap tanggal pelaporan menilai apakah terdapat indikasi penurunan nilai aset yang bersumber dari informasi internal maupun eksternal, yang dilakukan berdasarkan kelompok aset penghasil kas. Jika indikasi tersebut ada, Perusahaan mengestimasi nilai wajar aset dikurangi dengan biaya menjual. Kerugian penurunan nilai aset diakui jika nilai wajar dikurangi dengan biaya menjual lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat. Pemulihan kerugian penurunan nilai aset diakui dalam laporan laba rugi tidak boleh melebihi jumlah tercatat tanpa kerugian penurunan nilai.

i. Aset Takberwujud

Aset tak berwujud pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan .

Perusahaan pada setiap tanggal pelaporan menilai apakah terdapat indikasi penurunan nilai aset yang bersumber dari informasi internal maupun eksternal, yang dilakukan berdasarkan kelompok aset penghasil kas. Jika indikasi tersebut ada, Perusahaan mengestimasi nilai wajar aset dikurangi dengan biaya menjual. Kerugian penurunan nilai aset diakui jika nilai wajar dikurangi dengan biaya menjual lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat. Pemulihan kerugian penurunan nilai aset diakui dalam laporan laba rugi tidak boleh melebihi jumlah tercatat tanpa kerugian penurunan nilai.

j. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui pada saat penyerahan barang dan jasa atau penerimaan tunai dari penyerahan barang dan jasa,
Beban diakui pada saat terjadinya biaya sesuai dengan periode manfaat dari pembiayaan tersebut.

k. Imbalan Pascakerja

Perusahaan belum mencatat dan menyisihkan kewajiban imbalan pascakerja sebagaimana diatur dalam SAK 24 "Imbalan Pascakerja". Pengakuan Kewajiban tersebut seharusnya didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Ketentuan tersebut, perusahaan diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada karyawannya pada saat mereka berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia dan cacat tetap. Besarnya imbalan kerja tersebut terutama berdasarkan lamanya masa kerja dan besarnya kompensasi karyawan pada saat penyelesaian hubungan kerja. Pada dasarnya imbalan kerja berdasarkan UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah program imbalan pasti.

k. Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak kini. Pajak kini diakui dalam laba/rugi kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian.
Pajak kini adalah utang atau piutang pajak yang diharapkan atas penghasilan atau rugi kena pajak selama tahun berjalan, dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substantif berlaku pada tanggal pelaporan keuangan, dan penyesuaian terhadap utang pajak tahun-tahun sebelumnya.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, ketika hasil banding tersebut telah ditetapkan.

KAS DAN SETARA KAS

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Kas		
- Kas / *Cash*	6,552,000	6,552,000
Setara Kas Operasional		
- Bank Mandiri Banyumanik	1,458,441,276	1,313,634,155
- Bank Mandiri Banyumanik	1,662,442,652	1,040,710,723
Setara Kas IJP		
Jumlah	**36,902,421,969**	24,391,282,083

INVESTASI

Rincian investasi terdiri dari:

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Deposito Berjangka	78,700,000,000	54,950,000,000
Efek - Tersedia Untuk Dijual	27,571,500,000	5,391,916,000
Jumlah	**106,271,500,000**	60,341,916,000

a. Deposito Berjangka

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
JUMLAH	**78,700,000,000**	54,950,000,000

b. Efek - Tersedia untuk Dijual

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Obligasi Pemerintah FR0074	7,403,900,000	-
Obligasi Pemerintah FR0075	9,315,000,000	-
Obligasi Pemerintah FR0068	3,330,000,000	3,155,844,000
Obligasi Pemerintah FR0072	4,472,000,000	2,236,072,000
Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap II Tahun 2016	2,000,400,000	-
Obligasi Berkelanjutan I Semen Indonesia Tahap I Tahun 2017	1,050,200,000	-
Jumlah	**27,571,500,000**	5,391,916,000

Penjelasan atas investasi ini disajikan sebagai berikut :

Obligasi Negara Seri FR0074, tingkat bunga 7,5% per tahun, waktu jatuh tempo pad tanggal 15 Agustus 2032

Obligasi Negara Seri FR0075, tingkat bunga 7,5% per tahun, waktu jatuh tempo pad tanggal 15 Mei 2038.

Obligasi Negara Seri FR0068, tingkat bunga 8,38% per tahun, waktu jatuh tempo pad tanggal 15 Maret 2034

Obligasi Negara Seri FR0072, tingkat bunga 8,25% per tahun, waktu jatuh tempo pad tanggal 15 Mei 2036.

Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap II Tahun 2016, tingkat bunga 8,5% per tahun, waktu jatuh tempo pad tanggal 28 September 2021.

Obligasi Berkelanjutan I Semen Indonesia Tahap I Tahun 2017, tingkat bunga 8,6% per tahun, waktu jatuh tempo pad tanggal 22 Juni 2022.

PIUTANG IJP

Jumlah saldo piutang IJP per 31 Desember 2017 dan 2016, adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Piutang IJP	1,629,467,185	507,225,716
Jumlah	**1,629,467,185**	507,225,716

PIUTANG C0-GUARANTEE / REASURANSI/ PENJAMINAN ULANG

Jumlah saldo piutang co-guarantee/reasuransi/penjaminan ulang per 31 Desember 2017 dan 2016, adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Piutang co-guarantee/ reasuransi/ penjaminan ulang	2,044,670,641	877,199,439
Jumlah	**2,044,670,641**	877,199,439

PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

Jumlah saldo pendapatan iuran jasa penjaminan yang masih harus diterima per 31 Desember 2017 dan 2016, adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	1,815,850,593	228,733,561
Jumlah	**1,815,850,593**	228,733,561

Pendapatan yang harus diterima merupakan pendapatan iuran atas jasa penjaminan yang masih harus diterima.

BIAYA DIBAYAR DIMUKA - LANCAR

Jumlah saldo biaya dibayar dimuka lancar per 31 Desember 2017 dan 2016, adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Sewa Kantor	207,375,000	150,000,000
Lain-lain	148,000,000	-
Jumlah	**355,375,000**	150,000,000

ASET TETAP - BERSIH

Jumlah saldo aset tetap netto per 31 Desember 2017 dan 2016, adalah sebagai berikut :

	2017			
	saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	saldo Akhir
Biaya Perolehan				
Kendaraan	114,137,000	877,252,000	-	991,389,000
Peralatan Komputer	318,028,500	218,597,120	-	536,625,620
Peralatan Kantor	655,247,890	215,091,750	-	870,339,640
Partisi	76,006,335	730,677,500	-	806,683,835
Jumlah	**1,163,419,725**	**2,041,618,370**	**-**	**3,205,038,095**

Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai				
Kendaraan	22,821,106	56,949,458	-	79,770,564
Peralatan Komputer	89,405,902	105,356,564	-	194,762,467
Peralatan Kantor	173,317,978	151,083,491	-	324,401,468
Partisi	14,163,896	49,446,480	-	63,610,376
Jumlah	**299,708,882**	**362,835,993**	**-**	**662,544,875**
Nilai Buku	**863,710,842**			**2,542,493,220**

	saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	saldo Akhir
Nilai Perolehan				
Perangkat Lunak				
Kendaraan	98,287,000	15,850,000	-	114,137,000
Peralatan Komputer	177,363,499	140,665,000	-	318,028,500
Peralatan Kantor	334,480,400	320,767,489	-	655,247,890
Partisi	-	76,006,335	-	76,006,335
Jumlah	**610,130,900**	**3,288,825**	**-**	**1,163,419,725**
Amortisasi Penyusutan				
Kendaraan	921,4398	13,606,708	-	22,821,106
Peralatan Komputer	28,826,173	60,579,729	-	89,405,902
Peralatan Kantor	56,834,492	116,483,485	-	173,317,978
Partisi	-	14,163,896	-	14,163,896
Jumlah	**94,875,063**	**204,833,819**	**-**	**299,708,882**
Jumlah Aset Tetap Netto	**515,255,837**			**863,710,842**

Beban penyusutan untuk periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016,, adalah berjumlah Rp. 362.835.993,- dan Rp. 204.833.819,-.

Merujuk kepada hasil *review* dan evaluasi tersebut, tidak terdapat indikasi penurunan nilai aset tetap pada tanggal laporan posisi keuangan.

ASET TIDAK BERWUJUD - BERSIH

Jumlah saldo aset tidak berwujud - netto per 31 Desember 2017 dan 2016, adalah sebagai berikut :

		2017		
	saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	saldo Akhir
Biaya Perolehan				
Perangkat Lunak	664,850,938	735,730,934	-	1,400,581,872
Jumlah	**664,850,938**	**735,730,934**	**-**	**1,400,581,872**
Amortisasi				
Perangkat Lunak	50,232,606	134,547,237	-	184,779,843
Jumlah	**50,232,606**	**134,547,237**	**-**	**184,779,843**
Jumlah Aset Tidak Berwujud-Neto	**614,618,332**			**1,215,802,029**

	saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	saldo Akhir
Biaya Perolehan				
Perangkat Lunak	1,175,000,000	664,850,938	,175,000,000	664,850,938
Jumlah	**1,175,000,000**	**664,850,938**	**,175,000,000**	**664,850,938**

Amortisasi				
Perangkat Lunak	-	50,232,606	-	50,232,606
Jumlah	-	**50,232,606**	-	**50,232,606**
Jumlah Aset Tidak Berwujud-Neto	**1,175,000,000**			**614,618,332**

BEBAN DIBAYAR DIMUKA - TIDAK LANCAR

Jumlah saldo biaya dibayar dimuka tidak lancar per 31 Desember 2017 dan 2016, adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Jumlah	**19,928,952,967**	-

ASET LAIN - LAIN

Jumlah saldo aset tidak lancar lain - lain per 31 Desember 2017 dan 2016, adalah masing-masing sebesar Rp. 98.476.515,- dan Rp. 128.734.243,-.

Aset lain-lain merupakan aset dalam bentuk biaya atas renovasi kantor.

UTANG KLAIM

Jumlah saldo utang klaim per 31 Desember 2017 dan 2016, adalah masing-masing sebesar Rp. 1.188.491.272,- dan Nihil.

IJP YANG DITANGGUHKAN

Jumlah saldo IJP yang ditangguhkan per 31 Desember 2017 dan 2016, adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Pendapatan IJP ditangguhkan	12,066,427,275	933,403,725
Jumlah	**12,066,427,275**	933,403,725

PERPAJAKAN

Jumlah saldo perpajakan per 31 Desember 2017 dan 2016, adalah sebagai berikut :

a. Pajak dibayar dimuka

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
PPh 21	16,764,426	-
Jumlah	**16,764,426**	-

b. Utang Pajak

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
PPh 21	76,203,736	442,995,021
PPh 23	1,874,420	-
Pajak Penghasilan Badan	360,131,627	981,920,190
Jumlah	**438,209,783**	1,424,915,211

c. Pajak Tangguhan

	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi	Dikreditkan (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain	**31 Desember 2017**
Aset Pajak Tangguhan			
Imbalan kerja	113,597,678	17,259,575	130,857,254
Kenaikan/ penurunan Cadangan klaim	116,277,982	-	116,277,982
Kenaikan/ penurunan IJP yang belum merupakan pendapatan	49,519,313	-	49,519,313
Accrued bunga deposito / *Unrealize*	(42,165,617)	-	(42,165,617)
Revaluasi harga pasar obligasi		(19,423,111)	(19,423,111)
Accrued bunga obligasi/ *Unrealize*	(133,057,535)	-	(133,057,535)
Jumlah	**104,171,822**	**(2,163,536)**	**102,008,286**

d. Pajak Penghasilan Badan

Estimasi perhitungan pajak berdasarkan laporan laba rugi kena pajak sebagai berikut:

	31 Desember 2017
Laba sebelum pajak	7,442,980,288
Koreksi beda waktu	
Imbalan kerja	454,390,713
Kenaikan Cadangan klaim	465,111,929
Kenaikan IJP yang belum merupakan Pendapatan	198,077,250
Revaluasi harga pasar Obligasi	(77,692,444)
Accrued bunga deposito / *Unrealize*	(168,662,466)
Accrued bunga obligasi / *Unrealize*	(532,230,139)
Koreksi beda tetap	
Pendapatan bunga	(6,833,301,495)
Kupon obligasi	(897,344,846)
Kenikmatan natura	368,905,000
Biaya promosi/ pemasaran	1,138,569,700
Biaya jamuan	154,944,248
Taksiran Penghasilan Kena Pajak	**1,713,747,738**

Taksiran pajak penghasilan - non final

Penghasilan kena pajak fasilitas $\frac{4,800,000,000}{15,053,749,346}$ x 1,718,747,000 = 546,440,984

Penghasilan kena pajak non fasilitas = 1,713,747,000 – 546,440,984 = 1,167,306,016

Pajak penghasilan -fasilitas 546,440,984 x 50% x 25% = 68,305,123

Pajak penghasilan - non fasilitas 1,167,306,016 x 25% = 291,826,504

Pajak penghasilan - non final 360,131,627

Taksiran pajak penghasilan - final

- Pendapatan bunga deposito	6,664,639,029	x	20% =	1,332,927,806
- Pendapatan jasa giro	685,590,381	x	20% =	137,118,076
- Pendapatan deviden	897,344,846	x	15% =	134,601,727
				1,604,647,609

HUTANG PREMI REASURANSI

Jumlah saldo hutang premi reasuransi per 31 Desember 2017 dan 2016, adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Hutang Reasuransi	1,263,117,587	1,242,319,776
Jumlah	**1,263,117,587**	1,242,319,776

HUTANG AKUISISI

Jumlah saldo utang akuisisi per 31 Desember 2017 dan 2016, adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Hutang Akuisisi	1,012,191,076	551,408,885
Jumlah	**1,012,191,076**	551,408,885

HUTANG IJP C0-GUARANTEE / PENJAMINAN ULANG

Jumlah saldo hutang IJP per 31 Desember 2017 dan 2016, adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Jumlah	**65,415,997**	709,052,691

CADANGAN KLAIM

Jumlah saldo cadangan klaim per 31 Desember 2017 dan 2016, adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Cadangan Klaim	5,303,039,187	4,837,927,258
Jumlah	**5,303,039,187**	4,837,927,258

LIABILITAS LAIN - LAIN

Jumlah saldo liabilitas lain - lain per 31 Desember 2017 dan 2016, adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Liabilitas Titipan IJP	398,666,069	1,012,500,000
Liabilitas Lain - Lain	2,260,214,278	1,247,714,278
Jumlah	**2,658,880,347**	2,260,214,278

IJP YANG DITANGGUHKAN

Jumlah saldo IJP yang ditangguhkan per 31 Desember 2017 dan 2016, adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Pendapatan IJP	18,377,722,366	951,114,239

Jumlah	**18,377,722,366**	951,114,239

UTANG IMBALAN PASCA KERJA

Perusahaan membukukan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk semua karyawan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pasca kerja tersebut adalah 36 karyawan di tahun 2017 dan 27 karyawan di tahun 2016.

Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2017/2016
Metode	*Projected Unit Credit Method*
Tingkat diskonto	8,4% / 7,95%
Tingkat kematian	Sesuai dengan tabel mortalita Indonesia 2011 (TMI-11)
Tingkat kenaikan gaji	10%
Tingkat cacat	1% dari tabel mortalitas dari usia 20 hingga 54 tahun
Tingkat pengunduran	Sesuai dengan tabel mortalita Indonesia 2011
Usia Pensiun	56 tahun

Jumlah saldo imbalan pasca kerja per 31 Desember 2017 dan 2016,, adalah masing-masing sebesar Rp. 1,628,735,567,- dan Rp. 1,105,306,553,-

MODAL DISETOR

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah yang diaktakan dengan No. 12 dari Dr. Widhi Handoko, S.H., Sp.N Notaris di Semarang tanggal 28 April 2017, Modal Dasar Perseroan sebesar Rp 200,000,000,000,- terbagi dalam 20.000 lembar saham dengan nominal masing-masing saham sebesar Rp 10,000,000,-, dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian oleh para pemegang saham sebanyak 12.110 lembar saham.

Dari Modal Dasar Perusahaan yang ditempatkan dan diambil bagian telah disetor penuh dengan komposisi pada tanggal 31 Desember 2017, seperti dibawah ini:

	31 Desember 2017		
Pemegang Saham	**Saham / Lembar**	**Kepemilikan (%)**	**Nilai Modal Saham (Rp)**
Pemerintah Propinsi Jawa Tengah	12,000	99.1%	120,000,000,000
KPRI Bhakti Praja	50	0.4%	500,000,000
Pemerintah Kabupaten Temanggung	40	0.3%	400,000,000
Pemerintah Kabupaten Grobogan	20	0.2%	200,000,000
Jumlah	**12,110**	**100%**	**121,100,000,000**

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah yang diaktakan dengan No 22 dari Dr. Widhi Handoko, S.H., Sp.N Notaris di Semarang tanggal 24 Mei 2016, Modal Dasar Perseroan sebesar Rp 200,000,000,000,- terbagi dalam 20,000 lembar saham dengan nominal masing-masing saham sebesar Rp 10,000,000,-, dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian oleh para pemegang saham sebanyak 7,070 lembar saham.

Dari Modal Dasar Perusahaan yang ditempatkan dan diambil bagian telah disetor penuh dengan komposisi pada tanggal 31 Desember 2016, seperti dibawah ini:

	31 Desember 2016		
Pemegang Saham	**Saham / Lembar**	**Kepemilikan (%)**	**Nilai Modal Saham (Rp)**
Pemerintah Propinsi Jawa Tengah	7,000	99.0%	70,000,000,000
KPRI Bhakti Praja	50	0.7%	500,000,000
Pemerintah Kabupaten Temanggung	20	0.3%	200,000,000
Jumlah	7,070	100.0%	70,700,000,000

CADANGAN

Saldo cadangan per 31 Desember 2017 dan 2016, adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Umum	996,788,490	260,348,348
Dana kesejahteraan	279,100,777	72,897,537
Dana sosial	159,486,158	41,655,736
Jasa produksi	-	67,095,411
Laba ditahan	67,095,411	-
Jumlah	**1,502,470,836**	441,997,031

PENDAPATAN IMBAL JASA PENJAMINAN (IJP)

Jumlah tersebut merupakan pendapatan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016, adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Imbal Jasa Penjaminan Bruto	15,053,749,346	28,261,574,966
IJP Co-guarantee/IJPU/Premi Reasuransi	(2,541,676,079)	(12,080,460,427)
Pendapatan/Beban Akuisisi Penjaminan	(748,423,982)	(6,164,896,781)
Jumlah	**11,763,649,285**	10,016,217,758

BEBAN KLAIM

Jumlah tersebut merupakan beban klaim untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Beban Klaim Bruto (pembebanan dari hutang)	10,186,894,690	2,909,360,693
Klaim Co-guarantee/penjaminan	(12,956,044,099)	(3,971,868,245)
Kenaikan/Penurunan Cadangan Klaim	(465,111,929)	(4,033,441,384)
Beban Klaim Lainya	(198,077,250)	-
Jumlah	**(3,432,338,588)**	(5,095,948,936)

PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

Jumlah tersebut merupakan pendapatan operasional lainnya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016, adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Pendapatan Bunga	8,051,122,015	3,500,292,689
Jumlah	**8,051,122,015**	3,500,292,689

BEBAN OPERASIONAL LAINNYA

Jumlah tersebut merupakan beban operasional lainnya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016, adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Beban Administrasi dan Umum	5,419,622,569	2,065,453,532
Beban gaji dan Pegawai	4,972,516,124	4,053,714,510
Beban Penyusutan dan Amortisasi	497,383,230	298,426,613
Beban Operasional Lain - Lain	409,863,990	659,276,182
Jumlah	**11,299,385,913**	7,076,870,838

PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL

Jumlah tersebut merupakan pendapatan dan beban non operasional yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016, adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Pendapatan Non Operasional	997,517,056	2,602,862,252
Beban Non Operasional	(25,924,388)	(18,872,166)
Jumlah	**971,592,668**	2,583,990,086

LABA - RUGI TAHUN BERJALAN

Jumlah tersebut merupakan pendapatan operasional lainnya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016, adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	5,588,863,481	2,945,760,570
Jumlah	**5,588,863,481**	2,945,760,570

MANAJEMEN RISIKO

a. Analisa Manajemen Risiko

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik wajib dilakukan oleh Perusahaan maka Perusahaan secara konsisten memberi perhatian penuh dan melaksanakan analisa risiko yang mempunyai dampak terhadap kelangsungan operasional Perusahaan dengan melalukan pengamatan, identifikasi, pengelolaan dan pengendalian risiko.

Sejauh ini Perusahaan telah mengidentifikasi empat kategori risiko yang harus dihadapi:

1. Risiko Teknis yang menyangkut bidang Penjaminan dan Klaim

Dalam bidang Penjaminan terdapat potensi timbulnya kerugian yang berkaitan dengan proses akseptasi risiko. Untuk mengurangi risiko tersebut Perusahaan selalu konsisten menerapkan kebijakan akseptasi yang wajar dan berhati-hati, melakukan survey risiko sebelum akseptasi, meningkatkan kualitas para *underwriternya* dan memiliki prosedur baku yang tertuang dalam manual akseptasi yang diperbaharui secara berkala.

Perusahaan melakukan evaluasi atas semua potensi kerugian yang ada dan meminimalkan dengan proteksi reasuransi yang tepat dengan limit yang memadai dari perusahaan-perusahaan reasuransi yang berkualitas untuk menutup kerugian-kerugian yang mungkin terjadi tersebut.

Risiko dalam hal klaim mungkin terjadi apabila terdapat beberapa klaim besar yang terjadi pada saat yang hampir bersamaan. Nilainya bisa sangat besar. Untuk mengantisipasi hal ini selain program reasuransi yang baik, Perusahaan juga melakukan sebagian besar investasinya dalam bentuk yang likuid sehingga liabilitas Perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka Panjang dapat terpenuhi.

2. **Risiko Kredit**

Risiko kredit adalah risiko dimana Perusahaan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan, klien atau pihak rekanan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Instrumen keuangan Perusahaan dan yang mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri dari kas di bank, deposito berjangka dan piutang. Jumlah eksposur maksimum risiko kredit sama dengan nilai tercatat atas akun-akun tersebut

Perusahaan mengelola risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk masing-masing pelanggan dan lebih selektif dalam pemilihan bank

3. **Risiko Likuiditas**

Risiko likuiditas adalah risiko di mana posisi arus kas Perusahaan menunjukkan pendapatan jangka pendek tidak cukup untuk menutupi pengeluaran jangka pendek.

Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas dan setara kas yang mencukupi dalam memenuhi komitmen Perusahaan untuk operasi normal Perusahaan dan secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, serta jadwal tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan.

4. **Risiko keuangan yang menyangkut pengelolaan dana**

Risiko pengelolaan dana dilakukan dengan dua pendekatan, yang pertama adalah manajemen *cash flow* dengan mempersingkat waktu penagihan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) sehingga dana dapat lebih cepat diinvestasikan. Kedua, untuk mengantisipasi perubahan ekonomi global dan lokal, perubahan situasi politik, perubahan peraturan dan faktor lain yang dapat mempengaruhi keamanan investasi, Perusahaan menerapkan penempatan investasi dengan porfolio yang berimbang dalam berbagai instrumen seperti deposito berjangka, obligasi, dan menghindari investasi yang berisiko tinggi.

5. **Risiko Hukum menyangkut kemungkinan adanya tuntutan secara hukum**

Sebagai perusahaan Penjaminan , Perusahaan tidak terlepas dari kemungkinan adanya tuntutan-tuntutan secara hukum. Hal ini bisa terjadi akibat ketiadaan peraturan perundangan yang mendukung permasalahan atau adanya kelemahan dalam kontrak.

Upaya Perusahaan dalam mengantisipasi risiko ini adalah dengan memiliki tenaga yang handal dibidang hukum, menyempurnakan kontrak-kontrak yang ada, melengkapi semua persyaratan sesuai peraturan yang ada dan bekerja sama dengan konsultan hukum untuk membenahi perangkat administrasi hukum di Perusahaan.

6. **Risiko teknologi dan Informasi yang menyangkut potensi kerugian dari sistem informasi**

Sangat cepatnya perkembangan teknologi informasi membuat suatu peristiwa internal maupun eksternal berpotensi menimbulkan kerugian bagi Perusahaan. Kejadian seperti serangan virus, pembajakan informasi, bencana alam, gangguan jaringan atau sistem dapat menimbulkan kerugian melalui biaya restorasi data yang cukup besar dan menurunnya kualitas pelayanan.

Untuk mengendalikan risiko ini Perusahaan secara berkesinambungan meningkatan sistem keamanan untuk proteksi, melakukan *back up support* yang lebih teratur, menyiapkan *Contingency Plan* untuk mengatasi keadaan darurat, mengkaji dan mengimplementasikan kebijakan keamanan sistem informasi dengan konsekuen.

b. **Nilai wajar instrumen keuangan**

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan yang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan mendekati nilai wajarnya baik karena jatuh tempo dalam jangka pendek atau yang memiliki tingkat suku bunga pasar.

Tabel berikut menyajikan Perbandingan dengan kategori jumlah tercatat dan nilai wajar aset dan liabilitas Perusahaan yang dicatat dalam laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016:

	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
Aset Keuangan :	**36,902,421,969**	**36,902,421,969**
Kas dan Setara Kas		
Investasi		
Deposito Berjangka	78,700,000,000	78,700,000,000
Efek - Tersedia Untuk Dijual	27,493,807,556	27,571,500,000
Piutang IJP	1,629,467,185	1,629,467,185
Piutang Co -guarentee / Reasuransi / Penjaminan Ulang	2,044,670,641	2,044,670,641
Liabilitas Keuangan :		
Utang Klaim	1,188,491,272	1,188,491,272
Utang Pajak	578,924,357	578,924,357
Utang Premi Reasuransi	1,263,117,587	1,263,117,587
Utang Akuisisi	1,012,191,076	1,012,191,076
Utang IJP Co-guarantee / Penjaminan Ulang	65,415,997	65,415,997
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	785,000,000	785,000,000
Liabilitas Lancar Lain - Lain	2,408,890,347	2,408,890,347

PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada peristiwa setelah tanggal neraca yang berpengaruh secara signifikan terhadap posisi keuangan PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah per 31 Desember 2017.

TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 26 Februari 2018

Informasi Kontak

Kantor Pusat

PT Jamkrida Jateng

Jl Setiabudi No 128 Banyumanik

Semarang

Telp 024 7477 666

Fax 024 7497 0001

www.jamkrida-jateng.co.id

Otoritas Jasa Keuangan

Dewan Komisioner Industri Jasa Keuangan Non Bank (IKNB)

Menara Mulia lantai 11

Jl Gatot Subroto No. 42

Jakarta

Telp 021 29600000

Fax 021 3857917

www.ojk.go.id

Pemegang Saham Pengendali

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Biro Perekonomian

Jl Pahlawan No. 9 Mugassari

Semarang Selatan-Kota Semarang

Telp : 024 831 1174, 024 831 1183

Fax : 024 8318890

http://biroperekonomian.jatengprov.go.id

Auditor

KAP Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry

Jl. Kepu Barat No. 90-91 B Kemayoran

Jakarta Pusat

Telp 021 29263060

Fax -

www.kapjerry-arhj.com

Bank Kustodi

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Plaza Mandiri

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38

Jakarta

Telp 021 5265045

Fax 021 5274477

www.bankmandiri.co.id

Jaringan Kantor Pelayanan

Banyumas

Gedung PLUT

Jl. Senopati, Dukuhwaluh, Kembaran

Kabupaten Banyumas

Kudus

Jl. Kudus – Pati KM. 08

Jekulo - Kudus

Pekalongan

Jl. Kertijayan No. 29

RT 23 RW 08

Kabupaten Pekalongan

Solo

Gedung HIPMI

Jl. Bhayangkara No. 57

Baron - Surakarta

Purwodadi

Ruko Depan Hutan Kota Purwodadi

Jl. Gajah Mada No. 16

Purwodadi

Magelang

Jl. Pahlawan

Kelurahan Potrobangsan

Magelang

Jamkrida Jateng

PT Jamkrida Jateng didirikan tidak semata-mata menjanjikan laba, tapi MAMPU menjadi pemicu *(trigger)* bagi UMKM dan menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat

PT Jamkrida Jateng
Jl Setiabudi No 128, Banyumanik, Semarang
Telp 024 7477 666 Fax 024 7497 0001
www.jamkrida-jateng.co.id

Jamkrida Jateng

PT Jamkrida Jateng
Kantor Pusat :
Jl. Setiabudi No. 128 Banyumanik, Semarang
Telp.(024) 7477666 Fax.(024) 74970001
Email : customer.service@jamkrida-jateng.co.id
Website : www.jamkrida-jateng.co.id

Kantor Perwakilan Purwodadi :
Ruko Depan Hutan Kota Purwodadi
Jl. Gajah Mada No.16, Purwodadi

Kantor Perwakilan Pekalongan :
Jl. Kertijayan No. 29 RT. 23 RW. 08 Kab. Pekalongan

Kantor Perwakilan Banyumas :
Gedung PLUT, Jl. Senopati, Dukuhwaluh, Kembaran
Kabupaten Banyumas

Kantor Perwakilan Kudus :
Jl. Kudus Pati KM.08, Jekulo - Kudus

Kantor Perwakilan Magelang :
Jl. Pahlawan, Kel. Potrobangsan, Magelang

Kantor Perwakilan Solo :
Gedung HIPMI, Jalan Bhayangkara no.57
Baron-Surakarta

jamkrida.jateng jamkrida_jateng jamkridajateng jamkridajateng

www.jamkrida-jateng.co.id